

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI
(Studi Kasus Di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)**

TESIS

OLEH
ARIAN SAHIDI
NIM: 14770040



**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI
(Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I)

Diajukan oleh:

Arian Sahidi
NIM. 14770040



Dosen Pembimbing:

H. M. Mudjab, Ph.D
NIP. 19661121 200212 1 001

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 19750310 200312 1 004

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Arian Sahidi
NIM : 14770040
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
(Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)

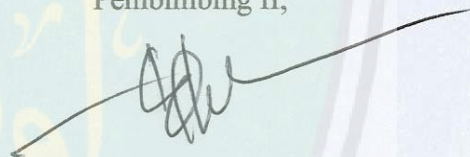
Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Tesis.

Pembimbing I,



Dr. H. Mudjab, Ph.D.
NIP. 19661121 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.
NIP. 19761002 200312 1 003

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag.
NIP. 19671220 199803 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)**, telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 7 Desember 2016,

Dewan penguji,

Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd
NIP. 19720306 200801 2 010

Ketua

Dr. H. Rahmat Aziz, M. Si
NIP. 19700813200205 1 001

Penguji Utama

Dr. H. Mudjab, Ph.D
NIP. 19661121 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 19761002 200312 1 003

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I
NIP. 19561231 198303 1 032

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah 216)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S Al-Insyirah 6-7)

Persembahan

Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Istri Tersayang

Dan Seluruh Keluarga Besar Yang Selama Ini Telah Mensupport Saya dalam Menyelesaikan Penulisan Tesis ini.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arian Sahidi
NIM : 14770040
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh rang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 08 November 2016



Arian Sahidi

NIM 14770040

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan tanpa ada kendala dalam penyelesaiannya.

Penelitian Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)” ditulis dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan serta untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I).

Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa melibatkan banyak pihak yang membantu penyelesaiannya. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag selaku Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mudjab, Ph.D dan Dr. H. Muhammad In’am Esha, M.Ag selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Nandi Mulyadi, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis.
7. Segenap Asatidzah di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto yang telah berusaha membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.

8. Keluarga besar Magister Pendidikan Agama Islam kelas B angkatan 2014, yang telah menjadi sahabat dalam berdiskusi, berdialogika dalam mencari formulasi pendidikan Islam.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unah-Nya kepada kita semua. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Penulis

HALAMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

2. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F

خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

Tabel 1.1 Daftar Penanggung Jawab (PJ)

Tabel 1.2 Daftar Siswa

Tabel 7.1 Struktur Kurikulum



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gedung SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Tampak Depan

Gambar 2 : Gedung SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Tampak Samping

Gambar 3 : Kegiatan Tasmi' Al Qur'an Setiap Jum'at Pagi

Gambar 4 : Kegiatan Buka Bersama Puasa Ramadhan

Gambar 5 : Kegiatan Desain Kelas

Gambar 6 : Masa Orientasi Siswa Baru

Gambar 7 : Tahfidz Al Qur'an

Gambar 8 : Ekskur Pramuka

Gambar 9 : Kegiatan Belajar dan Mengajar



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran II	: Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusi
Lampiran III	: Laporan Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus
Lampiran IV	: Laporan Non Akademik Anak Berkebutuhan Khusus
Lampiran V	: Individual Education Program (IEP)
Lampiran VI	: Permendiknas No. 70 Tahun 2009
Lampiran VII	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran VIII	: Foto Dokumentasi
Lampiran IX	: Biodata Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRASILTERASI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Pendidikan	14
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan	14
2. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan	18
3. Aspek-aspek yang Tercakup dalam Kebijakan Pendidikan	23
B. Pendidikan Inklusi.....	23
1. Pengertian Pendidikan Inklusi.....	23
2. Tujuan Pendidikan Inklusi	29
3. Landasan Pendidikan Inklusi	30
4. Memahami Praktik Inklusi	37

5. Dari Segregesi Menuju Inklusi.....	38
6. Kriteria Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	41
7. Mekanisme Penyelenggaraan	44
B. Titik Singgung Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Inklusi	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Latar Penelitian	56
D. Data dan Sumber Data Penelitian	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	60
G. Tahapan-tahapan Penelitian	61
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	61
BAB IV PEMAPARAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	63
1. Sejarah Berdiri SMP Al Irsyad Purwokerto	63
2. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Al Irsyad Purwokerto	65
3. Wawasan Pendidikan SMP Al Irsyad Purwokerto	68
4. Budaya Siswa-siswi SMP Al Irsyad Purwokerto	73
5. Data Pendidik dan Peserta Didik SMP Al Irsyad Purwokerto	75
6. Struktur Kurikulum	77
B. Proses Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Al Irsyad	79
C. Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad	83
1. Desain Kurikulum	83
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	89
3. Sarana dan Prasarana	96
4. Strategi Pembelajaran	100
5. Evaluasi dan Sistem Penilaian	111
BAB V PEMBAHASAN	
A. Prosedur Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus	120
B. Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad	124

BAB VI

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
Daftar Rujukan	135
Daftar Lampiran	



ABSTRAK

Sahidi, Arian. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)*, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) H. M. Mudjab, Ph.D. (2) Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Inklusi*

Salah satu permasalahan yang krusial dalam pendidikan adalah pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau difabilitas (kaum difabel), yang jumlahnya tidaklah sedikit. Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah penyandang cacat terus bertambah dari tahun ke tahun. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa. Besarnya angka penyandang difabilitas di Indonesia tersebut menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak para penyandang difabilitas tersebut sebagai seorang warga negara. Salah satu usaha pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi penyandang difabilitas usia sekolah atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah dengan adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara empiris dan objektif Bagaimana identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: penjarangan (screening), pengalihan (referral), klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. (2) Ada 3 model pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu: Model kurikulum umum (reguler), model kurikulum umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang diindividualisasikan. (3) Tenaga pendidik di sekolah umum penyelenggaraan pendidikan inklusi terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK). (4) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. (5) Kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: *integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group*, program khusus, dan *therapy*.

ABSTRACT

Sahidi, Arian. *Implementation of Policy for Inclusion Education (A Case Study at SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)*, Magister of Islamic Education, Postgraduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Malang. Adviser (1) H.M Mudjab, Ph.D. (2) Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

Keywords : *Education Policy, Inclusive Education*

Education is basic human rights and important for the implementation of other human rights. One of the crucial problems in education is the educational services for the disabled. In Indonesia, based on a survey of the Statistics Indonesia (BPS) in National Socio-Economic Survey (SUSENAS), the number of the disabled persons continues to grow from year to year. The latest data shows that the number of persons with disability in Indonesia reaches approximately 2% of 244,775,796 as the total population of Indonesia, or 3,654,356 people. The huge numbers of disability in Indonesia requires government to keep giving the rights for the disabled as a citizen. One of the Government's efforts in providing a decent education service for the disabled or special-need children (ABK) of school age is the existence of a policy of the implementation of Inclusive Education.

This research aimed to describe empirically and objectively the regulation of inclusive education in Indonesia and to know the implementation of the policy of inclusive education implemented at SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. This research used qualitative approach. The type of this research was case study. The result of the research shows that (1) The identification of children with special needs was conducted for five purposes: screening, referral, classification, the planning of learning, and monitoring the progress of the study.(2) There are 3 models of curriculum that used in inclusive school: general curriculum, general curriculum with modifications and individualized curriculum. (3) The educators of inclusive school are : master class, teachers of subjects (religious education, physical education and health), and special education teachers. (4) The school uses facilities and infrastructure where the inclusive education is held. If it is needed, schools can make a proposal to the district education service or the provincial Office of education to provide anything that required in inclusive school. (5) Teaching and learning activities for students with disability in inclusive school are: integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group, special programs, and therapy.

مستخلص البحث

شهيدى، أريان. ٢٠١٦. قرار تطبيق تعليم إدارة التربية التضمينية (الدراسة التحليلية بمدرسة الثانوية الاسلامية الارشاد فوروكرتا). أطروحة. برنامج ماجستير التربية الاسلامية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشارون: (١) الدكتور محمد معجب الحاج، (٢) الدكتور محمد إنعام عيسى الحاج.

كلمات الرئيسية: قرار التعليم، التربية التضمينية

أن من أهم الحقوق الانسانية التي يجب توفرها بداية لإنتاج الحقوق الأخرى هي التربية. وفيها مشاكل هامة خاصة في مسألة خدمة التعليم وراحته للطلبة العاجزين الذي ازدادت جملتهم عبر مرور الأزمان. وفي بلدنا إندونيسيا مثلاً، ازدادت جملتهم من خلال السنين كما بينتها اللجنة الرئيسية لإحصائية أن عددهم يبلغ حوالي ٣,٦٥٤,٣٥٦ شخصاً، بمعنى أن جملتهم تصل ٢% من جميع سكان البلد (٢٤٤,٧٧٥,٧٩٦). وذلك تستدعي الحكومة إلى تصليح شتى العناصر المتعلقة بحقوق الطلاب العاجزين. منها أتاحت لهم خدمات التعليم بهم من خلال قرار إدارة التعليم للطلاب العاجزين.

والقصد من هذا البحث إبراز تنظيم التعليم للطلاب العاجزين وإدارته في بلد إندونيسيا بوضوح جلي ومعرفة تطبيق القرار المرتبط بتعليم الطلاب العاجزين في مدرسة الثانوية الاسلامية الارشاد فوروكرتا. وهذا البحث يستخدم منهج النوعي بالدراسة التحليلية الموضوعية.

ونتيجة هذا البحث تدل على: (١) تعيين الاطفال بإحتياج الخاصة تعمل لخمسة الأهداف وهي: الغربة (screening) الإحالة (referral)، التصنيف (classification)، تخطيط التعليم وملاحظة تقدّم التعلم، (٢) المنهج المستخدم في المدرسة التضمينية لها ثلاثة انواع: المنهج المنتظم، المنهج المعدّل والمنهج الفردي، (٣) المدرسون في المدرسة العامة التي تقوم بها التربية التضمينية، وهي تتكون على مدرس الفصل، مدرس المواد التعليمية و المدرس الخاص للتربية التضمينية، (٤) الوسائل في تنفيذ التربية التضمينية باستخدام الوسائل في المدرسة العامة التي تقوم بها التربية التضمينية. واذا محتاج، المدرسة تستطيع أن تقدّم الاقتراح إلى وزارة تربية المحافظة ووزارة تربية المقاطعة لوفاء احتياجات في تنفيذ التربية التضمينية. (٥) استراتيجية التدريس لدى الطلبة العاجزين في المدرسة التضمينية تستخدم الطرائق كما يلي: **one, integrated in the regular classroom, small group, to one teaching**، برنامج الخاص و العلاج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan penting untuk pelaksanaan semua hak asasi manusia lainnya. Meski pendidikan merupakan hak setiap individu, namun jutaan anak-anak dan orang dewasa tetap kehilangan kesempatan pendidikan, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan.

Salah satu permasalahan yang krusial dalam pendidikan adalah pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau difabilitas (kaum difabel), yang jumlahnya tidaklah sedikit. Menurut data yang dimiliki PBB seperti dikutip oleh Hery Kurnia Sulistyadi¹, pada tahun 2010, terdapat 12% penyandang cacat dari jumlah populasi penduduk di dunia atau sekitar 650 juta jiwa adalah penyandang cacat, dimana hampir 25% dari jumlah tersebut atau sekitar 163 juta orang adalah anak usia sekolah.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah penyandang cacat terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari survei awal yang dilakukan oleh BPS pada tahun 1998 menjelaskan bahwa jumlah angka kecacatan dalam populasi tahun tersebut sebesar 1.601.005 jiwa yaitu sekitar 0.8% dari total penduduk. Kemudian pada Tahun 2003, BPS melakukan

¹ Hery Kurnia Sulistyadi, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Sidoarjo" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.

survei kembali dengan rincian jenis kecacatan per-provinsi yang hasilnya jumlah penyandang cacat mencapai 2.454.359 jiwa atau sekitar 2% dari total 215.276.000 jiwa penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 2.810.212 jiwa. Dan data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa.

Besarnya angka penyandang difabilitas di Indonesia tersebut menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak para penyandang difabilitas tersebut sebagai seorang warga negara. Hak para penyandang disabilitas secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sudah disebutkan dengan sangat jelas dalam UU tersebut, bahwa kaum penyandang cacat atau difabel juga memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia yang lain. Salah satunya dalam hal ketersediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi penyandang difabilitas usia sekolah atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), di mana hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah mereka yang mempunyai hambatan fisik dan atau mental sehingga memerlukan layanan khusus untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. ABK dapat juga diartikan sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu merujuk pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Terkait dengan jumlah penyandang difabilitas usia sekolah atau

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), data dari SUSENAS BPS tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabilitas usia sekolah di Indonesia sebesar 532.130 jiwa, atau sekitar 14,56% dari total penduduk penyandang difabilitas di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3.654.356 jiwa.²

Sudah disepakati oleh seluruh masyarakat di dunia, bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut UNESCO mengadakan sebuah konferensi yaitu, *The Salamanca World Conference on Special Needs Education* pada tahun 1994. Pada paragraf ketiga dari *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* yang dihasilkan dari konferensi tersebut disepakati bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk mengakomodasi seluruh anak termasuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun kelainan lainnya.³ Sekolah-sekolah juga harus memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkelainan maupun yang berbakat, serta anak-anak yang berasal dari golongan-golongan termarjinalkan yang lain.

Sejalan dengan *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*, UNESCO mencetuskan prinsip “pendidikan untuk semua” atau *educational for all*. Prinsip *educational for all* tersebut mengandung makna bahwa pendidikan tersedia untuk semua tanpa memandang perbedaan, atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan

² Hery Kurnia Sulistyadi, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Sidoarjo” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.

³ [http://unesdoc.unesco.org/education_for_all_\(efa_america\)_inclusion.pdf](http://unesdoc.unesco.org/education_for_all_(efa_america)_inclusion.pdf) - An Efa Flagship. 2004. *The Rights to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion*, diakses tanggal 18 September 2015.

siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Filosofi *educational for all* lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya pernyataan Salamanca yang menegaskan perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang inklusi dan tidak diskriminatif.

Dari semangat *educational for all* itulah pemikiran mengenai pendidikan inklusi muncul, di mana hak mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan sebuah pondasi untuk hidup bermasyarakat. Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak sebayanya di sekolah reguler.⁴ Sedangkan menurut Sapon-Shevin sebagaimana dikutip oleh Geniofam⁵, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah ini menampung semua murid di kelas yang sama, menyediakan program pendidikan yang layak, dan menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid.

Sekolah inklusi dituntut untuk menyesuaikan kurikulum, sarana dan prasarana, maupun sistem pembelajaran yang diterapkan dengan kondisi peserta didik. Pendidikan inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan

⁴ Amy James, *School Success for Children With Special Needs* (San Francisco: Josey-Bass A Wiley Imprint, 2007), hlm. 51.

⁵ Geniofam, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Garailmu, 2010), cet. 1, hlm. 61-62.

sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat.⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan inklusi menjamin akses dan kualitas. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya.

Salah satu contoh lembaga pendidikan yang berusaha mengembangkan individu mandiri yang aktif tanpa membedakan apakah terdapat kelainan mental, cacat fisik ataupun hambatan psikis adalah Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.⁷ Al Irsyad merupakan sekolah Islam yang menjalankan pendidikan agama Islam dalam *setting* inklusi. Al Irsyad berkedudukan di Purwokerto dan dikelola oleh Lajnah Pendidikan dan Pengajaran (LPP) Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.⁸ Al Irsyad memandang bahwa setiap individu adalah istimewa dan layak memperoleh pelayanan dan penghargaan yang sama karena Tuhan telah menganugerahkan mereka derajat dan hak-hak yang sama, sekalipun dengan potensi, minat dan pertumbuhan pribadi yang berbeda-beda.

Al Irsyad memfasilitasi proses adaptasi siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan sekolah agar mereka memiliki perkembangan

⁶ Endis Firdaus, "Pendidikan Inklusi dan Implementasinya di Indonesia" Makalah: Disampaikan dalam *Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)* Purwokerto, 24 Januari 2010.

⁷ Selanjutnya dalam Tesis ini penulis akan menggunakan istilah Al-Irsyad untuk menyebut lembaga ini. Al-Irsyad Purwokerto terletak di Jl. Jatiwinangun No. 37 Purwokerto, Jawa Tengah 53114.

⁸ <http://www.alirsyadpwt.com/content/lajnah>, diakses tanggal 22 Desember 2015.

potensi individu yang optimal, memiliki perkembangan emosi sesuai dengan usianya, menjadi individu yang mandiri, dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial melalui pendekatan holistik antara sekolah, orang tua dan tim profesional.

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia cukup mengembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan.

Pendidikan inklusi bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pendidikan Inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak atas pendidikan, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik.

Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya. Begitu juga dengan peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun bantuan teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan melakukan penelitian tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus Di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan pokok yang akan dicarikan jawabannya pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses identifikasi anak berkebutuhan khusus di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto?
2. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara empiris bagaimana proses identifikasi anak berkebutuhan khusus di SMP Al Irsyad Purwokerto.
2. Untuk mendeskripsikan secara empiris bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmiah yang menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat umum dalam pengembangan wacana pendidikan terutama pendidikan agama Islam bagi siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Guru pada umumnya agar memahami pentingnya upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah inklusi yang berimplikasi pada keberhasilan belajar siswa.
2. Memberikan informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini kepala sekolah, terhadap pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah inklusi dan pola pembinaan guru-gurunya dalam meningkatkan mutu pendidikan.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tingkat daerah dan pusat untuk peningkatan perhatiannya pada pendidikan bagi kelompok siswa berkebutuhan khusus.
4. Memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat tentang perlakuan yang harus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, terutama pemenuhan hak memperoleh layanan pendidikan bagi mereka sebagai warga masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan orang lain.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari pengulangan kajian terhadap penelitian yang sama, penulis menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian dengan penelitian sebelumnya untuk menjamin orisinalitas penelitian ini. Hasil dari pelacakan penulis tercatat ada beberapa penelitian serupa tetapi tidak spesifik mengkaji bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi, diantaranya:

Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjorten dalam *Education-Special Needs Education*, menjelaskan tentang hakikat dan penyebab kecacatan yang pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kebudayaan di Utara, Selatan, Timur dan Barat. Dalam buku ini dibahas pula pentingnya memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan secara individual.⁹

Siti Barokah dalam *Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusi: Studi Kasus pada Sekolah Inklusi SD Hj. Isriati Semarang*, penelitian Tesis yang dilakukan di Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2008 ini mengkaji tentang pendidikan moral atau etika bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang menerapkan pendidikan Inklusi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan moral dapat dilakukan oleh institusi sekolah umum terhadap semua siswa tanpa membedakan yang normal dan tidak normal.¹⁰

⁹ Berit H. Johnsen dan Miriam D Skjorten, *Education-Special Needs Education* (Oslo University: Unifub Forlag, 2001), hlm. 2-4.

¹⁰ Siti Barokah, "Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusi : Studi Kasus pada Sekolah Inklusi SD Hj. Isriati Semarang", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Selanjutnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (PULITJAKNOV) Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Depdiknas tahun 2008 tentang *Pengkajian Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*, mengkaji tentang efektifitas penyelenggaraan pendidikan inklusi di beberapa tempat yang dijadikan percontohan oleh pemerintah. Hasil penelitiannya menilai bahwa ada beberapa fasilitas dan faktor pendukung yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusi.¹¹ Bandi Delphie dalam *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, menjelaskan tentang pengenalan jenis kelainan anak dan sejumlah teknik pembelajaran yang berpusat pada aplikasi gerak. Gerak manusia dapat dijadikan sebagai basis pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.¹²

Berikut ini peneliti sajikan persamaan dan perbedaan yang dimaksud dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Berith H. Johnsen & Miriam D Skjorten, <i>Educatioan-Special Needs</i>	Meneliti Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	Fokus tentang hakikat dan penyebab kecacatan yang pada dasarnya tidak ada	Membahas bagaimana kebijakan penyelenggara an pendidikan inklusi

¹¹ PUSLITJAKNOV BALITBANG DEPDIKNAS, *Pengkajian Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta: Diknas, 2008).

¹² Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi* (Klaten: PT Insan Sejati Klaten, 2009).

	<i>Education, (Oslo University: Unifub Forlag, 2001)</i>		perbedaan antara kebudayaan Utara, Selatan, Timur dan Barat.	
2	Siti Barokah, <i>Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusi: Studi Kasus pada Sekolah Inklusi SD Hj. Isriati Semarang</i> (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008)	Meneliti Pendidikan Inklusi	Mengkaji tentang pendidikan moral atau etika bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi.	Membahas bagaimana kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi
3	Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (PULITJAKNOV) Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Depdiknas tahun 2008 tentang <i>Pengkajian Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah</i>	Meneliti Pendidikan Inklusi	Mengkaji tentang efektifitas penyelenggaraan pendidikan inklusi di beberapa tempat yang dijadikan percontohan oleh pemerintah.	Membahas bagaimana kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi
4	Bandi Delphie, <i>Pembelajaran</i>	Pembelajaran Anak	menjelaskan tentang	Membahas bagaimana

	<i>Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi</i> , (Bandung: PT Refika Aditama)	Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi	pengenalan jenis kelainan anak dan sejumlah teknik pembelajaran yang berpusat pada aplikasi gerak.	sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan baik sesuai dengan tujuan diadakannya pendidikan inklusi
--	--	--	--	---

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesatuan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, istilah-istilah yang perlu ditegaskan:

1. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan inklusi.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dimaksud disini adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas reguler/biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya dan menyediakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak (anak tanpa kebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus) melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian dan sarana prasarana. Penyelenggaraan pendidikan disini akan difokuskan bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Al Irsyad.

Dari pengertian istilah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prosedur identifikasi anak berkebutuhan khusus dan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi yang meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan sarana prasana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang difokuskan kepada pendidikan agama Islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan pendidikan. Untuk bisa memahami arti dari kebijakan pendidikan, maka perlu memahami apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut.

Mengartikan kata kebijakan tidaklah mudah, setiap literatur yang membahas tentang kebijakan memberikan definisi yang berbeda tergantung sudut pandang yang mereka gunakan. Kesulitan dalam memberikan pengertian terhadap kebijakan karena luasnya fenomena. Terry menjelaskan arti kebijakan¹³, yaitu petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah tindakan dan aturan yang harus diikuti oleh pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengelolaan dan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi pemecahan masalah atas problem yang dihadapi.

Kebijakan dapat pula dipahami sebagai pengambilan keputusan, termasuk juga ketika seorang pemimpin memutuskan untuk tidak bertindak atau memutuskan untuk tidak mengurus isu terkait. Pengambilan

¹³ G. R. Terry, *Principles of Management* (6th ed) (London: Richard D. Irwin Inc, t.th.), hlm. 186.

keputusan didefinisikan oleh Lunenburg¹⁴ sebagai “*the process of choosing from among alternatives, is important to an understanding of educational administration because choose processes play an important role in motivation, leadership, communication, and organizational change*”

Pendapat ini mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari berbagai alternatif yang ada untuk memecahkan masalah. Pengelolaan pendidikan harus memahami proses ini dengan baik karena proses ini berperan penting dalam memotivasi, dalam kepemimpinan, komunikasi, dan perubahan organisasi.

Kebijakan menurut Tilaar dan Nugroho¹⁵ merupakan fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, kebijakan sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, terutama pada tahap perumusan kebijakan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan tidak saja bersifat positif namun juga bisa bersifat negatif, dalam artian bahwa keputusan yang diambil menerima yang satu dan menolak yang lainnya. Walaupun dalam kebijakan ada ruang bagi *win-win solution* dimana semua kepentingan dapat diakomodasi, namun ruang tersebut sangatlah kecil, kebanyakan kebijakan lebih mengarah pada *zero-sum-game* yaitu menerima salah satu dari sekian banyak pilihan.

¹⁴ Lunenburg. C. Freud dan Allan C. Ornstein, *Educational Administration; Concepts and Practices* (USA: Wadsworth, t. th.), hlm. 155.

¹⁵ H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 185.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan suatu landasan berpikir, bertindak, sarana, petunjuk, aturan, program dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung usaha pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan ekspresi perilaku dan sebuah norma yang memuat konsistensi dan aturan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Bahkan kebijakan sangat memegang peran penting sebagai alat yang berorientasi pada aksi pemecahan masalah dan memberikan kontribusi dalam menentukan sumber kegiatan, input, proses yang menunjang outputnya sehingga memberikan dampak positif.

Setelah memahami arti kebijakan, bagaimana dengan kebijakan pendidikan? Tujuan akhir pendidikan nasional secara umum adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara terinci dalam pasal 3 UU No 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa¹⁶:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Demi tercapainya tujuan mulia tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan strategis demi terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif. Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut.¹⁷

Menurut Tilaar dan Nugroho¹⁸, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Jadi kebijakan pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Sedangkan menurut Arif Rohman, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

¹⁷ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm. 107-108.

¹⁸ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. 3, hlm. 17.

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses dimana suatu pertimbangan-pertimbangan mesti diambil dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bersifat melembaga, bersifat umum dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pendidikan. Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan diarahkan untuk pengembangan segala sumberdaya pendidikan yang ada guna mencapai tujuan pendidikan, serta pengembangan seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan keterampilan demi peningkatan kualitas kognitif, afektif dan psikomotorik demi tercapainya sekolah yang efektif dan berbudaya mutu.

2. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan

Pembuatan kebijakan pendidikan merupakan salah satu fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan pendidikan yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap

¹⁹ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, hlm. 108

prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan terhadap kewenangan yang dimiliki.

Hal itu terkait dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerston bahwa kebijakan dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, menurut Gerston hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayaninya. Dengan pemahaman yang seperti itu dapat memastikan pembuatan kebijakan publik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

Anderson mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yaitu: (1) nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; (2) afiliasi partai politik; (3) kepentingan konstituen; (4) opini publik; (5) penghormatan terhadap pihak lain; serta (6) aturan kebijakan²⁰.

Proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang bersifat politis dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu dengan lainnya menurut urutan masing-masing, aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang

²⁰ James E. Anderson, *Public Policymaking: An Introduction, 5th ed.* (Boston: Houghton Mifflin, 2003), hlm. 137.

mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan²¹.

Bagi seorang administrator pendidikan, sebuah kebijakan yang merupakan hasil keputusan sangatlah penting diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap motivasi, komunikasi, kepemimpinan serta perubahan organisasi, kesalahan dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai dari diterapkannya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan yang merupakan tahap akhir dari proses perumusan kebijakan meliputi segala aspek manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi, semuanya membutuhkan kebijakan.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai kepada kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pilihan-pilihan ini sering disebut sebagai alternatif kebijakan yang dapat dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetujui. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah pembuatan keputusan, maka ada beberapa usul yang akan diterima begitu juga sebaliknya, sebagian lagi

²¹ William N. Dunn, *Publik Policy Analysis An Intraduction* (University of Pittsbuogh, Printice-Hal Inc Engleward Cliffs, t.th), hlm. 43.

akan ditolak, dan mungkin usul yang lain akan dipersempit. Pada tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, dan kebijakan hanya akan merupakan formalitas²².

Proses penyusunan kebijakan pendidikan yang menerapkan prinsip interaktif, partisipatif dan fungsi manajemen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Tahap Perencanaan (*planning*)

Tahap perencanaan adalah melakukan perancangan kebijakan pendidikan, yaitu: (a) orientasi, (b) pembentukan tim penyusun, (c) penyusunan rencana kegiatan, (d) menyiapkan dokumen-dokumen terkait, (e) identifikasi dan penentuan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan, (f) sosialisasi rencana pembuatan kebijakan.

(2) Tahap pengorganisasian (*organizing*)

Tahap pengorganisasian yaitu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki yaitu: (a) desain dan pembagian pekerjaan, (b) integrasi dan koordinasi tim, para pihak terkait, (c) penghimpunan data-data/dokumen-dokumen terkait, (d) perancangan desain dan konsep kebijakan, (e) menyebarluaskan informasi tentang rencana pembuatan kebijakan kepada masyarakat untuk dapat tanggapan.

(3) Tahap menggerakkan (*actuating*)

²² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Terori dan Proses* (Yogyakarta: MedPres, 2002), hlm. 120.

Tahap menggerakkan yaitu memimpin melakukan kegiatan kongkrit mulai penyusunan rancangan hingga pada penetapan kebijakan pendidikan yaitu: (a) penyusunan draft naskah akademik dan rancangan peraturan/ kebijakan, (b) penyebarluasan draft naskah akademik dan rancangan peraturan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan), (c) melakukan *Focus Group Discussion* (melibatkan perwakilan masyarakat/pemangku kepentingan), (d) perbaikan draft naskah akademik dan rancangan peraturan/kebijakan, (e) seminar draft naskah akademik dan rancangan peraturan/kebijakan (melibatkan perwakilan masyarakat/pemangku kepentingan), (f) pembahasan naskah akademik dan peraturan/kebijakan oleh penentu kebijakan, (g) penetapan (persetujuan, pengesahan, pengundangan), (h) sosialisasi kepada masyarakat.

(4) Tahap pengendalian (*controlling*)

Tahap pengendalian yaitu mengevaluasi setiap tahapan dan hasil akhir, sehingga secara interaktif dimungkinkan segera dilakukan perbaikan apabila diperlukan. Bentuk pengendalian dilakukan dengan: (a) mengawasi atau mengendalikan setiap tahapan, baik materi, waktu dan anggaran, (b) menyampaikan informasi secara terbuka setiap tahapan kepada masyarakat luas melalui berbagai sistem informasi dan menerima tanggapan dan masukan, (c) melakukan audit.

Tahapan tersebut menggambarkan terjadinya partisipasi dan interaksi antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan dan pemangku

kepentingan dan dilaksanakan dengan tahapan dalam manajemen. Sehingga penyelenggaraan yang transparan, akuntabel efektif dan efisien dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Aspek-aspek yang Tercakup dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut HAR Tilaar dan Riant Nugroho²³:

- a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
- b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan tampak dalam sumbangan bagi proses pemerdekaan individu dalam perkembangan pribadinya.

B. Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian inklusi, yang mana inklusi adalah istilah terbaru yang dipergunakan untuk

²³ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 120.

mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh.²⁴

Staub dan Peck dalam Tarmansyah mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas.²⁵ Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Sedangkan menurut Shapon-Shevin dalam buku Mengenal Pendidikan Terpadu (Direktorat Pendidikan Luar Biasa) bahwasanya pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.²⁶

Menurut Normal Kunc, pendidikan inklusi adalah bagian dari nilai-nilai kehidupan. Prinsip dasar inklusi adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat manusia. Melalui inklusi kita mencari dan memelihara anugerah yang ada pada setiap orang. Dengan cara ini bisa diyakini bahwa

²⁴ J. David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, terj. Denis dan Ny. Erica (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 6.

²⁵ Tarmansyah, *Inklusi (Pendidikan Untuk Semua)* (Jakarta: Depdiknas, 2007), hlm. 76.

²⁶ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Mengenal Pendidikan Terpadu)* (Jakarta: Depdiknas, 2004), hlm. 9.

siswa di sekolah inklusi akan terbebaskan dari tirani dengan mendapatkan hak mereka.²⁷

J. David Smith mengartikan pendidikan inklusi sebagai penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah.²⁸ Senada dengan pengertian ini, Departemen Pendidikan Nasional memahami pendidikan Inklusi dengan mendidik anak berkelainan bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.²⁹

Mega Iswari mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial atau gabungan dari hal-hal tersebut sedemikian rupa baik bersifat permanen ataupun temporer sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan ketunaan mereka.³⁰

Anak berkebutuhan khusus menurut Suran dan Rizo adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka adalah anak-anak yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang

²⁷ Normal Kunc, "The Need to Belong: Rediscovering Maslow's Hierarchy of Needs", dalam R. Villa, J. Thousand, W. Stainback, dan S. Stainback, *Education: An Administrative Guide to Creating Heterogeneous School* (Baltimore MD: Brooks, 1992), hlm. 38-39.

²⁸ J. David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, hlm. 45.

²⁹ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Mengenal Pendidikan Inklusi*, (Jakarta: Ditplb, 2006), hlm. 1.

³⁰ Mega Iswari, *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Depdiknas, 2007), hlm. 2.

tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan emosional. Selain itu, termasuk anak berkebutuhan khusus juga yaitu anak-anak yang berbakat dengan inteligensi yang tinggi, karena mereka memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional.³¹

Hallahan dan Kauffman mendefinisikan siswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait, jika mereka menyadari potensi penuh kemanusiaan mereka. Pendidikan khusus diperlukan karena mereka mungkin memiliki salah satu atau lebih hal berikut yaitu: keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, gangguan emosi atau perilaku, hambatan fisik, hambatan berkomunikasi, autisme, *traumatic brain injury*, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, atau anak-anak yang berbakat.³²

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang tergolong luar biasa atau berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.

³¹ B.G. Suran dan J.V. Rizzo, "Special Children: an Integrative Approach", *Journal of Education* 161-162 (Boston: Boston University, 1979), hlm. 95.

³² J.M. Kauffman dan D.P. Hallahan, *Exceptional Children: Introduction to Special Education* (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs: 2005), hlm. 8.

Karakteristik anak berkebutuhan khusus menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial sehingga berhak memperoleh pendidikan khusus. Selain itu, anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sehingga berhak memperoleh pendidikan khusus.³³

Menurut Bandi Delfi, anak berkebutuhan khusus yang terlayani di Indonesia antara lain adalah anak yang mengalami hendaya (*impairment*) penglihatan (*tunanetra*), anak dengan hendaya mendengar dan berbicara (*tunarungu wicara*), anak dengan hendaya perkembangan kemampuan fungsional (*tunagrahita*), anak dengan hendaya kondisi fisik motorik atau tunadaksa, anak dengan hendaya perilaku ketidakmampuan menyesuaikan diri (*mal adjustment*), dan anak berkesulitan belajar khusus.³⁴

Martin Omagor-Loican berpendapat bahwa inklusi adalah penyesuaian dan pengubahan praktis di rumah-rumah, sekolah-sekolah dan masyarakat luas. Inklusi juga berarti membuat perubahan-perubahan yang diperlukan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak, tanpa memandang perbedaan mereka dan memastikan mereka memiliki

³³ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 1, 2, 3, 4.

³⁴ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi* (Klaten: PT Insan Sejati Klaten, 2009), hlm. 2-3.

kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh serta setara pada apa yang terjadi dalam komunitas mereka.³⁵

Inklusi dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa memiliki hambatan adalah, keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah. Tentu saja, inklusi dapat mempunyai arti berbeda-beda bagi tiap orang.

Melalui pendidikan inklusi ini diharapkan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya. Tujuannya adalah tidak ada kesenjangan di antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Diharapkan pula anak dengan kebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak-anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman-teman seusianya. Untuk itu perlu adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak. Masyarakat yang melaksanakan pendidikan inklusi berkeyakinan bahwa hidup dan belajar bersama adalah cara hidup yang terbaik, yang

³⁵ Martin Omagor-Loican, *Towards Inclusive Education*. www.eenet.org.uk/.../docs/Towards_Inclusive_Education_Uganda.doc. diakses 26 Desember 2015.

menguntungkan semua orang, karena tipe pendidikan ini dapat menerima dan merespon setiap kebutuhan individual anak. Selain itu pendidikan inklusi juga melibatkan orangtua dalam cara yang berarti dalam berbagai kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaan. Sedang dalam proses belajar mengajar pendekatan guru berpusat pada anak. Keuntungan dari pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak normal dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.³⁶ Pengertian Pendidikan inklusi dapat disederhanakan menjadi pendidikan tanpa diskriminasi terhadap anak didik. Oleh karenanya semua anak berhak mendapat pendidikan di lingkungan yang sama supaya segala potensi yang dimilikinya bisa berkembang.

2. Tujuan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi bertujuan³⁷ :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

³⁶ Amy James, *School Success for Children With Special Needs* (San Francisco: Josey-Bass A Wiley Imprint, 2007), hlm. 51.

³⁷ Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a).

3. Landasan Pendidikan Inklusi

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti 'bhineka tunggal ika'. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa: (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi ('inklusi').

- 3) Pandangan universal hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.

b. Landasan Yuridis

- 1) UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: (1) berbunyi 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) 'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'.
- 2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48 'Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 'Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan'.
- 3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ps. 5 ayat (1) 'Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. Ayat (2): Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) 'Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus'. Ayat (4) 'Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus'. Pasal 11 ayat (1) dan (2) 'Pemerintah dan pemerintah

daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi'. 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun'. Pasal 12 ayat (1) 'Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b). Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1) 'Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa'. Ayat (2) 'Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.' Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa 'Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara *inklusi* atau berupa *satuan pendidikan khusus* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah'. Pasal 45 ayat (1) 'Setiap satuan

pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik’.

- 4) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan kependidikan, Standar sarana prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB, SMPLB dan SMALB.
- 5) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusi: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK.
- 6) Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

b. Landasan Empiris

- 1) Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*),

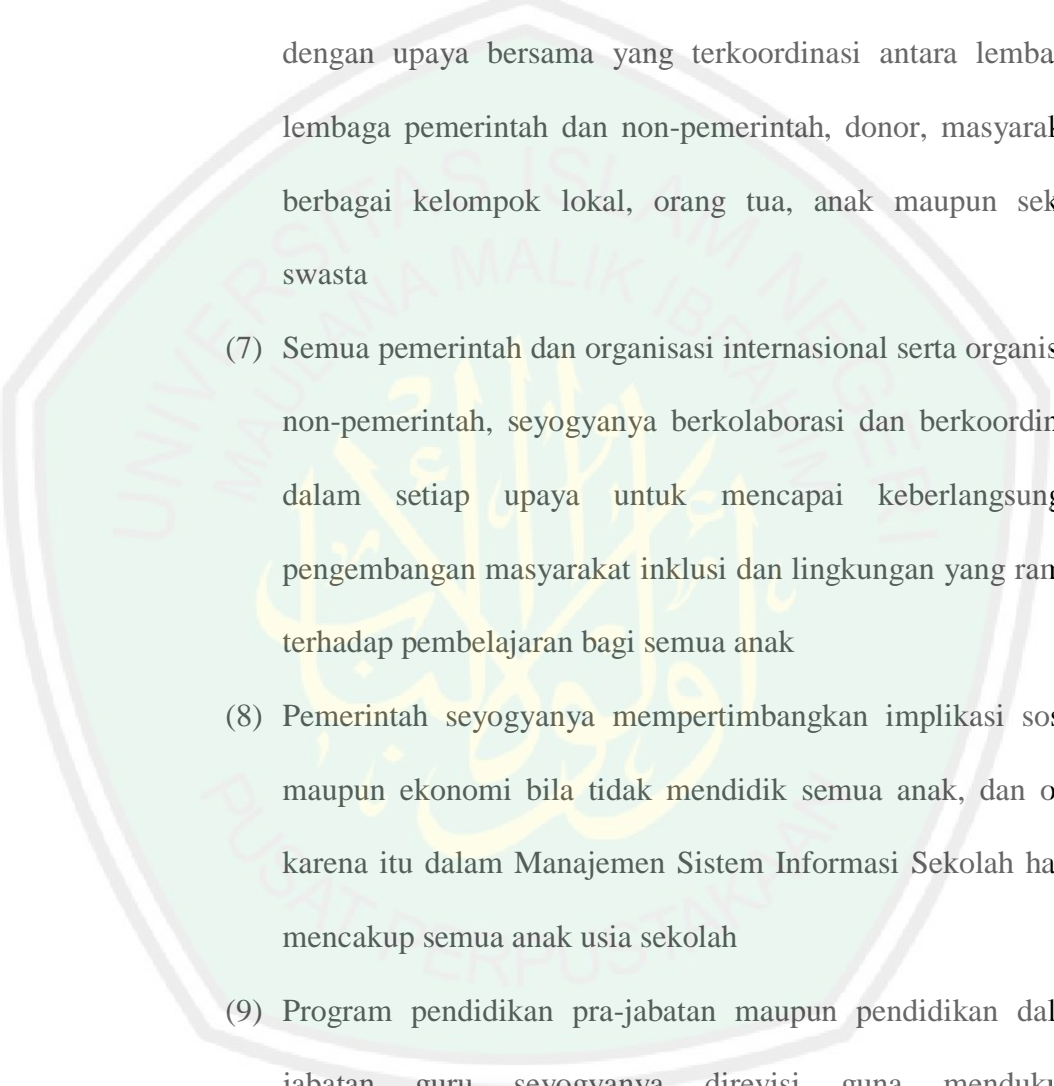
- 2) Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*),
- 3) Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*),
- 4) Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*)
- 5) Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (*The Salamanca Statement on Inclusive Education*),
- 6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), dan
- 7) Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusi”,
- 8) Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusi dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:
 - (1) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk ‘pendidikan untuk semua’ adalah benar-benar untuk semua;
 - (2) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan usia dini anak, pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada

saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan

- (3) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya:

- (1) Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional
- (2) Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan nasional, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya
- (3) Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas
- (4) Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka
- (5) Semua kementerian seyogyanya berkoordinasi untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi

- 
- (6) Demi menjamin pendidikan untuk Semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak (SRA), maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak maupun sektor swasta
- (7) Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusi dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak
- (8) Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu dalam Manajemen Sistem Informasi Sekolah harus mencakup semua anak usia sekolah
- (9) Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak pada tingkat usia pra-sekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar anak termasuk pada intervensi dini

(10) Pemerintah (pusat, propinsi, dan lokal) dan sekolah seyogyanya membangun dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusi

4. Memahami Praktik Inklusi

Pendidikan dengan *setting* inklusi mewakili suatu filosofi yang didasarkan pada tiga dimensi³⁸:

1) Integrasi Fisik

Penempatan siswa di ruangan yang sama dengan siswa bukan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama. Mengeluarkan mereka dari ranah ini hanya boleh dilakukan jika memang diperlukan.

2) Integrasi Sosial

Relasi antara siswa penyandang disabilitas dengan teman kelasnya, teman sebaya lainnya, dan juga orang dewasa tetap harus dipelihara. Seperti yang telah Anda perkirakan, lokasi yang memungkinkan untuk mencapai sasaran ini adalah ranah pendidikan umum, namun tidak menutup kemungkinan bagi siswa penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan teman sebaya di kelas pendidikan khusus.

3) Integrasi Pengajaran

Sebagian besar siswa harus diajarkan kurikulum yang sama dengan yang digunakan siswa bukan penyandang disabilitas. Mereka juga harus dibantu supaya berhasil dengan cara menyesuaikan rancangan cara

³⁸ Marilyn Friend dan William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan Praktis untuk Mengajar*, terj. Annisa Nuriowandari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 1, hlm. 34-35.

belajar mengajar (yang berarti menyediakan pengajaran dan akomodasi spesifik) berikut metode pengukuran hasil belajarnya. Bagi sejumlah siswa yang menyanggah gangguan kecerdasan serius, integrasi pengajaran bisa berarti menamatkan pengajaran dalam standar kurikulum umum, namun dengan ekspektasi yang telah disesuaikan (yang berarti membuat modifikasi).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dari praktik inklusi memiliki arti bahwa seluruh siswa merupakan tanggung jawab seluruh tenaga pendidik, dengan tanggung jawab utama diserahkan pada tenaga pendidik umum sembari didukung oleh tenaga pendidik khusus. Hal ini menandakan bahwa mengajar siswa-siswa ini bersama dengan teman sebaya mereka yang bukan penyandang disabilitas merupakan preferensi tenaga pendidik.

5. Dari Segregasi Menuju Inklusi

Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan dimana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal.³⁹

Khusus di Indonesia, sebelum ada sekolah inklusi, anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kelainannya

³⁹ Teguh Eko Saputro, *Sistem Pendidikan Anak Luar Biasa*. <http://teguhekosaputro.wordpress.com/2007/12/03/9/>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi mereka. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan yang lainnya. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat, mereka menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan dari orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan dalam menyuarkan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Seruan untuk menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam program-program pendidikan reguler yang dinamakan dengan pendidikan inklusi terus bergulir.⁴⁰

Bandi Delphie menyatakan bahwa konsep inklusi berdasarkan atas gagasan bahwa sekolah reguler harus menyediakan lingkungan belajar bagi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, apapun tingkat kemampuan ataupun kelainannya.⁴¹

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1990 di

⁴⁰ Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=311#list>, diakses tanggal 1 Januari 2016.

⁴¹ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, hlm. 15.

Bangkok yang menghasilkan deklarasi *education for all*. Implikasi dari statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusi yang selanjutnya dikenal dengan *The Salamanca Statement on Inclusive Education*.

Setelah beberapa negara melakukan uji coba maka diasumsikan bahwa pendidikan inklusi tampaknya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan oleh sistem segregasi. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak – termasuk anak berkebutuhan khusus – untuk belajar bersama-sama dalam lingkungan belajar yang sama, di mana semua anak memiliki akses yang sama ke sumber-sumber belajar yang tersedia, dan kebutuhan khusus setiap anak diperhatikan dan dipenuhi.

Di Indonesia, sejak awal tahun 2000 pemerintah mengembangkan program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusi.

Pada tahun 2004, di Indonesia diselenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusi sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

Pembahasan dari segregasi menuju inklusi memberikan bukti bahwa pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan tuntutan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Dan pendidikan inklusi dianggap sebagai layanan pendidikan yang paling sesuai untuk mengembangkan potensi mereka pada saat ini.

6. Kriteria Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Setiap satuan pendidikan formal, baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap Kecamatan dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan pendidikan

inklusi yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Permendiknas No 70 Tahun 2009⁴² yaitu; tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda.⁴³

Namun demikian untuk menghindari kemungkinan terjadinya implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi yang kurang sesuai, maka setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu memenuhi beberapa kriteria, di antaranya sebagai berikut⁴⁴:

a. Terdapat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Melalui proses identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didik di sekolah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh sekolah atau tenaga profesional lain, kita dapat menemukan ada atau tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.

Anak berkebutuhan khusus mungkin juga dapat diperoleh dari proses penjangkaran terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah di lingkungan terdekat. Anak berkebutuhan khusus

⁴² Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pasal 4 ayat 1.

⁴³ Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pasal 3 ayat 1. Lihat juga Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1,2,4. Pasal 45 ayat 1.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007*, hlm. 29.

juga dapat diperoleh berdasarkan hasil rujukan dari Sekolah Luar Biasa/Institusi lain terdekat, baik karena proses mutasi sekolah ataupun melanjutkan sekolah.

Jika sekolah umum tersebut terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, baik karena melalui proses identifikasi dan asesmen, penjangkaran di lingkungan terdekat, maupun rujukan SLB/Institusi lain, maka secara otomatis sekolah tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi.⁴⁵

b. Kesiapan Sekolah

Untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, setiap satuan pendidikan harus memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kesiapan dimaksud meliputi:

- (1) Adanya persepsi dan sikap yang positif dari semua komponen sekolah, termasuk orangtua anak pada umumnya, tentang pendidikan inklusi.
- (2) Adanya kemauan yang kuat dari sekolah untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan tanpa diskriminatif
- (3) Adanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi

⁴⁵ Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pasal 1

7. Mekanisme Penyelenggaraan

Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menindaklanjuti proposal/laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan.
- d. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi dengan menerbitkan surat penetapannya, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.⁴⁶

C. Titik Singgung Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Inklusi

Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain berbeda (*individual*

⁴⁶ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007*, hlm. 17.

differences). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan.

Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat 49:13).

Adanya siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus pada hakikatnya adalah manifestasi dari hakikat manusia sebagai *individual differences* tersebut. Interaksi manusia harus dikaitkan dengan upaya pembuatan kebajikan. Ada dua jenis interaksi antar manusia, yaitu kooperatif dan kompetitif.⁴⁷ Begitu pula dengan pendidikan, yang juga harus menggunakan keduanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Bertolak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa ada kesamaan antara pandangan filosofis dengan religi tentang hakikat manusia. Keduanya merupakan upaya menemukan kebenaran hakiki; filsafat menggunakan nalar belaka sedangkan agama menggunakan wahyu. Keduanya akan bertemu karena sumber kebenaran hakiki hanya satu yaitu

⁴⁷ QS. Al Maidah: 5: 2&48.

Tuhan Yang Maha Esa. Landasan filosofis dan religi akan bertemu untuk selanjutnya dapat menjadi landasan dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai produk kegiatan keilmuan, termasuk di dalamnya untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan inklusi sebagai implikasi lebih lanjut dalam gerakan perhatian dunia terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari kesadaran global tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Gerakan ini tentu saja banyak diilhami oleh tatanan nilai masyarakat yang sudah mengakar di masyarakat dunia sebelumnya yang bersumber dari nilai budaya, agama dan tradisi. Semua agama yang mengajarkan nilai menempatkan pendidikan sebagai bagian pokok dalam sendi kehidupan manusia. Islam sebagai bagian dari tatanan nilai yang hidup di sepertiga warga dunia juga telah mengilhami kesadaran hak asasi manusia dalam bidang pendidikan ini. Bahkan Islam sejak kelahirannya di abad 7 M telah mewajibkan pengikutnya untuk menuntut ilmu dari mulai lahir hingga akhir hayat.

Jika ingin menilik jayanya pendidikan Islam di masa lalu, maka tidak diragukan lagi bahwa sejarah telah membuktikan, perkembangan pendidikan Islam pada masa Al-Ma'mun berkembang sangat pesat. Bahkan pada masa Al-Ma'mun inilah dikatakan bahwa kemajuan Islam zaman klasik dalam keilmuan mencapai puncaknya. Pada masa Al-Ma'mun pendidikan Islam mengalami kemajuan mencakup berbagai bidang ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode dimana pendidikan Islam berkembang pesat yang ditandai dengan

berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah (sekolah-sekolah) formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan sangat dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan pola budaya umat Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya umat Islam.

Konsep dasar pendidikan multikultural telah dikenal sejak zaman Al-Ma'mun pada institusi pendidikan Islam *Bait Al-Hikmah*, Masjid, *Halaqah*, *Kuttab/Maktab*, *Ribath*, dan Majelis.⁴⁸

Islam sebenarnya sangat menekankan pentingnya pendidikan tanpa membedakan manusia sejak awal kemunculannya 14 abad yang lalu. Kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas hanya bagi sebagian atau golongan tertentu saja akan tetapi wajib bagi seluruh penganut Islam baik laki-laki, perempuan, cacat ataupun normal. Dengan demikian, pendidikan agama Islam wajib pula bagi penyandang cacat selama dia disebut sebagai manusia.⁴⁹ Pada zaman Rasulullah SAW., Ia memberi kepercayaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum sebagai Muadzin Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang perbedaan kepada mereka yang cacat ataupun normal sejak kedatangannya. Islam memberi penghormatan yang sama bagi

⁴⁸ Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 33.

⁴⁹ Abd al-Rahman al-Nahlawi mengaitkan kewajiban pendidikan dengan amanat manusia hidup di dunia. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai khalifah di dunia untuk beribadah dan mengamalkan serta menegakkan syariat Allah. Abd al-Rahman al-Nahlawi, *Usul al Tarbiyah al-Islamiyah wa-Asalibiha fi al-Bayti wa-al-Madrasati wa-al-Mujtama'* (Bairut Libanon: Daru al-Fikri al-Ma'asir, 1999), hlm. 18.

manusia, yang membedakan mereka hanyalah kadar taqwa.⁵⁰ Adapun wacana tentang bentuk implementasi lebih teknis dalam model pendidikan bagi mereka masih merupakan barang baru untuk diperbincangkan, baik di kalangan akademisi pendidikan Islam maupun para praktisinya. Apabila diperbandingkan antara nilai ajaran Islam tentang pendidikan dengan semangat implementasi pendidikan inklusi, dapat ditemukan titik temu yang bisa dijadikan landasan betapa pentingnya pendidikan Islam di kelompok siswa berkebutuhan khusus. Diantara titik temu tersebut adalah:

Titik singgung pertama adalah pendidikan sebagai kewajiban/hak. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu atau pendidikan bagi setiap penganut agama Islam adalah wajib hukumnya. Sumber Islam baik al-Qur'an maupun Hadis banyak memuat betapa pentingnya menuntut ilmu sehingga harus diwajibkan. Ayat yang pertama kali turun adalah suruhan untuk membaca yakni surat *al- 'Alaq* ayat 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”⁵¹

Membaca merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Islam sejak awal sudah menyadari bahwa membaca merupakan aktifitas pendidikan

⁵⁰ QS. Al-Hujurat (49) :13

⁵¹ QS. Al- 'Alaq (96): 1-5

yang sangat kompleks yang memiliki arti yang sangat luas baik secara psikologis maupun sosiologis.

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kewajiban baik untuk memahami kewajiban Islam maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban. Tuntutan kewajiban yang banyak tertuang dalam sumber Islam baik al-Qur'an maupun Hadis ini tidak dibatasi oleh batasan waktu dan usia. Karena ilmu merupakan kebutuhan seorang muslim dalam menjalankan peran dan fungsinya di dunia sebagai makhluk Tuhan, maka umat Islam diwajibkan menuntut ilmu di sepanjang hayat.⁵² Dengan demikian, bagi umat Islam belajar tidak hanya merupakan bagian dari hak asasinya akan tetapi juga merupakan bagian dari haknya dalam mengekspresikan pengamalan doktrin ajaran dan keyakinannya.

Manusia diperintahkan belajar secara terus menerus sepanjang hidupnya untuk membangun peradabannya. Selain itu, manusia telah ditetapkan Tuhan sebagai khalifah dan pengelola bumi, memanfaatkan semua yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan hidupnya dalam rangka memenuhi tujuan yang satu, yaitu mengabdikan kepada pencipta-Nya.⁵³

Islam selalu memberi motivasi berfikir kepada manusia, dengan kadar citra (derajat) tinggi yang melebihi malaikat. Tidak ada agama yang lebih

⁵² Hadis yang masyhur di kalangan umat dalam hal ini adalah "Tuntutlah ilmu sejak dalam buaian ibu hingga liang lahat". Meskipun hadis ini berstatus hadis maudlu atau disangsikan keasliannya namun hadis ini cukup efektif untuk membangkitkan umat Islam dalam mencari ilmu. Ulama ahli hadis merekomendasikan penggunaan hadis maudlu atau hadis palsu untuk mendorong melakukan amal baik.

⁵³ Al-Quran surat al-Dharyat ayat 60 menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Senada dengan ayat tersebut, Ruppert C. Lodge menyatakan bahwa hidup adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 30.

jauh dibanding Islam, dalam mengukuhkan kekuatan rasional (akal) yang pada gilirannya akan memproduksi ilmu pengetahuan dalam realitas kehidupan ini.⁵⁴

Sementara dalam perspektif inklusi, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Pernyataan pendidikan sebagai hak atau kewajiban bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel), karena perbedaan hanya terletak pada sudut pandang terhadap substansi yang sama: pendidikan sebagai hak lebih antroposentris dan pendidikan sebagai kewajiban lebih teosentris.⁵⁵

Titik singgung kedua adalah prinsip pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusi merupakan implikasi dari prinsip pendidikan sebagai hak asasi manusia yang penerjemahannya dalam kebijakan global 1990 menjadi pendidikan untuk semua, sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi pendidikan untuk semua melalui pembentukan tradisi melek huruf.⁵⁶

⁵⁴ M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 138.

⁵⁵ M. Quraish Shihab memandang perhatian terhadap hak-hak individu termasuk hak pendidikan bagi setiap warga dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya adalah makna dari adil. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan seperti ini yang akan melahirkan keadilan sosial. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 116.

⁵⁶ Semua anak harus mendapat pendidikan agar terhindar dari arus negatif yang muncul dari luar dirinya sehingga tidak terjerumus dalam kehinaan sebagai manusia. Abd al-Rahman al-

Dalam sejarah umat manusia, Islam yang pertama kali menggemakan bahwa dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah diperuntukkan bagi semua manusia, yang pada gilirannya nanti menjadi tanggung jawab para cendekiawan untuk mengarahkan dan membentuk masyarakat berperadaban.⁵⁷

Titik singgung ketiga adalah prinsip non-segregasi. Prinsip non-segregasi ini merupakan implikasi lain dari pendidikan sebagai kewajiban/hak. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan.

Metode spesifik Islam yang sempurna mampu menciptakan sistem pendidikan Islam yang jauh dari diskriminasi dan fanatisme kebangsaan, bahkan tidak mengasingkan mereka yang berbeda. Semua itu merupakan manifestasi dari proses pembentukan ke arah manusia yang paripurna.⁵⁸ Islam tidak pernah membedakan manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Persamaan (*musawah*) telah menjadi dasar atau prinsip Islam dalam sistem hubungan antar individu. Selain itu persamaan juga menjadi landasan dalam semua segi pergaulan sosial, seperti dalam hak-hak sosial, pertanggungjawaban dan sanksi, dan

Nahlawi, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa-Asalibiha fi al-Bayti wa-al-Madrasati wa-al-Mujtama'* (Bairut Libanon : Daru al- Fikri al-Ma'asir, 1999), hlm. 18.

⁵⁷ Ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan pernyataan ini adalah surat al-Tawbah ayat 122. Selain itu, ayat tentang pentingnya dunia ilmu pengetahuan terdapat dalam surat al-'Alaq ayat 1-2. Ayat yang menekankan tentang bidang tulis menulis terdapat pada surat al-Qolam ayat 1-2. Serangkaian ayat lain juga turut mengangkat derajat keilmuan dan ketinggian bendera para ulama yaitu surat Ali 'Imran ayat 18, al-Zumar ayat 19, al- Mujadalah ayat 11. M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, hlm. 133-134.

⁵⁸ M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, hlm. 139.

hak-hak umum seperti hak pendidikan, ekonomi dan hukum dan lain-lain. Dalam Islam, kesetaraan dan keadilan sosial diterapkan untuk menjamin dan mengangkat harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam akan menghindarkan penyelewengan dan kejahatan sosial. Islam memperlakukan seluruh manusia secara sama. Dalam sejarah Islam tidak pernah ditemukan bukti pembatasan dalam Islam untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Titik singgung keempat adalah perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh-kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik.

Karena semua individu berbeda dalam bakat dan kemampuan, maka tidak dapat diharapkan bahwa dua orang atau lebih bereaksi dengan cara yang sama terhadap rangsangan lingkungan yang sama. Demikian juga seseorang tidak dapat mengharapkan hasil yang sama dari orang dengan perkembangan usia dan intelektual yang sama.

Perbedaan bakat, kecenderungan dan kecerdasan individual manusia itu menegaskan individu sebagai pribadi yang khas dan unik, yang justru diperlukan bagi individualitas dalam pembentukan kepribadian. Individualitas bukan hanya membuat orang menyenangkan, tetapi juga memungkinkan masing-masing mengembangkan diri dan merealisasikan diri ke arah kemajuan sosial, serta menumbuhkan sikap kompetisi antar individu dalam

mencapai prestasi tinggi atau *musabaqah fi al-khairat*. Perbedaan tabiat individu ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Al-An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

*“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁵⁹

Hal ini hendaklah menjadi perhatian khusus para pendidik, yakni untuk mendidik dan mengasuh setiap individu sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kecerdasan pribadinya.

Salah satu prinsip pendidikan Islam adalah keharusannya untuk menggunakan metode pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia, meliputi dimensi jasmani ruhani dan semua aspek kehidupan, baik yang dapat dijangkau dengan akal maupun yang hanya diimani melalui kalbu, bukan hanya lahiriyah saja tapi juga batiniahnya.⁶⁰

Titik singgung kelima adalah cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal. Karena segenap daya dan potensi peserta didik wajib/berhak ditumbuh-kembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik. Hambatan belajar tidak lagi terletak pada diri peserta didik. Bila memfokuskan pada potensinya, bukan pada hambatan belajarnya,

⁵⁹ QS. Al-An'am (6): 165

⁶⁰ Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 27-28.

guru akan berusaha untuk melakukan asesmen terhadap anak itu. Dengan kata lain penilaian memfokuskan pada apa yang dapat dan senang dilakukan oleh anak sehingga dapat membuka jalan untuk menemukan potensi pendidikan anak serta kebutuhannya.

Disamping itu lingkungan belajar juga berperan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan keefektifan belajar. Dalam lingkungan masyarakat inklusi, harus siap mengubah dan menyesuaikan sistem, lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan semua orang serta mempertimbangkan kebutuhan semua orang. Bukan lagi anak yang berkebutuhan khusus yang harus menyesuaikan diri agar cocok dengan setting yang ada. Untuk ini diperlukan fleksibilitas, kreativitas dan sensitivitas.

Dari lima kesamaan prinsip nilai pendidikan Islam dan pendidikan inklusi tersebut kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kewajiban sekaligus hak untuk memperoleh pendidikan agama. Pendidikan agama bagi mereka merupakan kewajiban sebagai seorang muslim sebagaimana muslim lainnya yang normal. Selama dia tercatat sebagai seorang muslim dan mukmin maka dia memiliki hak dan tanggungjawab sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia yang kelak akan diperhitungkan di akhirat tentang amal perbuatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara umum, studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.⁶² Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

⁶² John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: SAGE Publications, 1998), hlm. 61.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang kredibel dan objektif terhadap subjek yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak dilakukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung. Jadi, dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri sekaligus sebagai pengumpul data.

Adapun tujuan kehadiran peneliti di lapangan adalah untuk mengamati secara langsung keadaan dan fenomena yang sedang terjadi di sekolah dan madrasah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah kejadian-kejadian tersebut akan berbeda jauh dengan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan cara lainnya.

C. Latar Penelitian

Lembaga pendidikan yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa lembaga pendidikan ini telah menerapkan pendidikan dengan *setting* inklusi. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto sudah resmi dijadikan sebagai kurikulum nasional Al-Irsyad se-Indonesia sejak April 2015.⁶³

Penulis pernah mengajar selama tiga tahun di Al Irsyad, berhadapan dengan anak-anak non difabel maupun penyandang disabilitas. Selama

⁶³<http://www.alirsyadpwt.com/content/kurikulum-al-irsyad-purwokerto-menjadi-kurikulum-nasional>, diakses tanggal 5 Desember 2015.

menjadi tenaga pendidik di Al Irsyad, penulis melihat begitu banyak perubahan dari anak-anak penyandang disabilitas, mereka lebih mandiri, lebih mudah berinteraksi dengan anak-anak lain. Begitu juga dengan anak-anak non difabel, mereka bisa menerima keberadaan anak-anak penyandang disabilitas di kelas mereka, ini menunjukkan bahwa antara anak penyandang disabilitas dan yang tidak terjadi interaksi yang positif dan ini sangat baik bagi peserta didik.

Di Kabupaten Banyumas, Al Irsyad menjadi sekolah inklusi percontohan yang dijadikan rujukan dalam menerapkan pendidikan dengan *setting* inklusi. Kelengkapan fasilitas pendidikan, terpenuhinya tenaga pendidik, adanya kerjasama dengan psikolog, sekolah luar biasa (SLB), dan juga Universitas dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus juga menjadi alasan mengapa sekolah ini yang dijadikan sebagai latar pendidikan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber informasi rujukan primer yang dipakai adalah sumber informasi yang diperoleh dari komunitas sekolah Al-Irsyad yang ditetapkan sebagai representasi penelitian. Untuk menentukan *key informan* yang akan menjadi responden dalam penelitian ini maka digunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁴ *Key informan* dalam hal ini adalah koordinator Inklusi masing-masing jenjang

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 216.

pendidikan, guru-guru umum dan guru-guru pendidikan agama Islam yang bertanggungjawab dalam penerapan pendidikan inklusi di Al-Irsyad.

Adapun sumber sekunder yang akan digunakan adalah tulisan yang terkait dengan pendidikan inklusi seperti: Sue Stubbs dalam *Inclusive Education Where There Are Few Resources*, (Oslo: The Atlas Alliance, 2002). Berit H. Johnsen, dan Miriam D Skjorten dalam *Education-Special Needs Education*, (Oslo University: Unifub Forlag, 2001). Bandi Delphie dalam *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Klaten: PT Insan Sejati Klaten, 2009), serta dokumen buku-buku panduan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Penelitian ini juga mengacu pada data-data ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai referensi yang telah ditelaah oleh peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Selain itu, penelitian juga menggunakan *internet search* terutama terhadap bahan-bahan yang sulit didapatkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁶⁵ Observasi digunakan untuk memahami secara holistik atau menyeluruh terhadap konteks situasi sosial pendidikan yang ada di Al- Irsyad.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Al-Irsyad. Pertanyaan yang digunakan berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan peneliti menemukan data-data yang tidak terduga.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono⁶⁶, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, studi dokumen diperlukan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Al-Irsyad.

⁶⁵ Ngalm Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 149.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 240.

F. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁷ Miles dan Huberman menyebutkan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru. Melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkitan kerja lapangan. Jalur analisis data dalam penelitian ini;

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.
2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.
3. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

⁶⁷ M.B. Mile dan Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), cet. 3, hal. 32

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tentu memerlukan tahapan-tahapan penelitian yang akan membawa peneliti pada tujuan akhir sebuah penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan menggunakan teknik analisis dokumen, wawancara dan observasi.
2. Mengolah data dengan sistem pengolahan metode kualitatif.
3. Melakukan interpretasi terhadap data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Menyusun sistematika penyajian data untuk dideskripsikan sebagai laporan hasil penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan serta memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data pembanding terhadap data dari sumber lainnya.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah metode pengecekan data melalui sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari sekolah dan madrasah serta informan lain yang akan ditemukan saat di lapangan nanti. Sedangkan

triangulasi metode adalah metode pengecekan data dari teknik wawancara dengan perangkat sekolah serta informan lain, dan peneliti mengeceknya dengan menyamakan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh.⁶⁸



⁶⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), hlm. 89.

BAB IV

PEMAPARAN PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdiri SMP Al Irsyad Purwokerto

SMP Al Irsyad Purwokerto merupakan salah satu sekolah yang berdiri di bawah organisasi Al Irsyad Al Islamiyyah cabang Purwokerto, yaitu organisasi masa Islam yang didirikan di Jakarta pada tanggal 6 September 1914 oleh Syekh Ahmad Surkati. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam dan berdasarkan Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw.⁶⁹

Dalam perkembangannya Al Irsyad Al Islamiyyah mendirikan cabang-cabang organisasi di daerah-daerah. Di Kabupaten Banyumas, Al Irsyad Al Islamiyyah berdiri pada tahun 1930. Pengurus cabang Al Irsyad Al Islamiyyah mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah yang berkedudukan di Purwokerto. Yayasan ini memiliki beberapa *Lajnah* (biro), yaitu Lajnah Pendidikan dan Pengajaran, Lajnah Dakwah, Lajnah Wanita, Lajnah Sosial dan Ekonomi, dan Lajnah Kepemudaan.⁷⁰

Lajnah Pendidikan dan Pengajaran mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah Al Irsyad Al Islamiyyah di Purwokerto. Saat ini Lajnah

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ir. Syarif Baasir, Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 5 Juni 2016.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ahmad Baasir, salah satu dewan pembina Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 15 Juni 2016.

Pendidikan dan Pengajaran Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto mengelola 6 sekolah, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) 01 dan 02, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT), dan SMP/SMA Boarding School.⁷¹

Ir. Syarif Baasir menjelaskan bawa,

“SMP Al Irsyad berdiri pada tanggal 28 Desember 1975. Pendirian SMP ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang sangat memprihatinkan dimana pada saat itu banyak umat Islam yang menyekolahkan anaknya ke SMP Nasrani yang dianggap favorit, seperti SMP Bruderan dan Susteran. Disamping itu, belum ada SMP Islam yang dianggap favorit dan diminati oleh masyarakat muslim Banyumas. Kondisi semacam ini membuat motivasi pengurus yayasan untuk mendirikan SMP di Purwokerto semakin kuat. Setelah melalui beberapa kali musyawarah, pengurus yayasan sepakat mendirikan SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan mempersiapkan beberapa prasyarat yang diperlukan dalam pendirian sekolah dan lembaga pendidikan, termasuk pengurusan ijin pendirian sekolah dan pengajuan bantuan tenaga pengajar kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyumas.⁷²

Sejak awal berdiri sampai dengan tahun pelajaran 1999/2000 SMP Al Irsyad Al Islamiyyah masih belum banyak melakukan inovasi dan pengembangan. Namun mulai tahun 2000/2001 SMP Al Irsyad dikelola secara modern dengan menerapkan sistem Pendidikan Islam Terpadu (IT). Keterpaduan yang dimaksud disini adalah keterpaduan antara sekolah dengan wali peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan keterpaduan antara muatan mata pelajaran umum dengan nilai-nilai agama Islam. Disamping itu juga keterpaduan dalam ilmu secara

⁷¹ <http://www.alirsyadpwt.com/content/lajnah>, diakses tanggal 10 Juni 2016.

⁷² Hasil Wawancara dengan Ir. Syarif Baasir, Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 5 Juni 2016.

teori dan praktik dengan membiasakan lingkungan Islami. Untuk mewujudkan keterpaduan ini sekolah menerapkan sistem *full day school* mulai pukul 07.00 – 14.30 WIB, sehingga guru mempunyai banyak waktu untuk melakukan komunikasi dengan anak didiknya secara individu maupun kelompok terkait kesulitan belajar maupun permasalahan internal siswa.⁷³

SMP Al Irsyad sejak berdiri hingga tahun 2012 beralamat di Jalan Jatiwinangun Gang Arjuna Purwokerto Timur, menempati area tanah seluas 880 m² dan di atasnya berdiri bangunan sekolah seluas 519 m², sedang luas tanah sisanya dipergunakan untuk bangunan masjid dan lapangan bermain. Namun mulai bulan Juli tahun 2013 SMP Al Irsyad Al Islamiyyah menempati bangunan baru yang berada di Jalan Prof. Soeharso (Komplek GOR Satria) Arcawinangun Purwokerto Timur.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Visi merupakan idealisme pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman.⁷⁴ SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto mempunyai visi “*Menjadi sekolah unggul dalam Akhlak Mulia, Prestadi Akademik, dan Berjiwa Sosial yang berbasis Aqidah Islamiyyah*”.⁷⁵

⁷³ Hasil Wawancara dengan Mustamim Luthfi, S.Pd.I, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, 7 Juni 2016.

⁷⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 143.

⁷⁵ Dokumen Sekolah, *Handbook For Parent* 2015/2016, SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, hlm. 4.

Sedangkan misi merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk menjabarkan dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan atau strategi operasional yang menggambarkan aktivitas atau kegiatan maupun upaya yang lebih operasional dan jelas untuk meraih visi.⁷⁶ Misi dari SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto yaitu:

- a. Melaksanakan pembiasaan amal shalih dan akhlak mulia
 1. Shalat dhuha
 2. Tadarus Al Qur'an
 3. Shadaqah
 4. 4 S (senyum, salam, sapa, dan santun)
 5. Tomat (tolong, maaf, terimakasih)
- b. Mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan
 1. Keterampilan belajar
 2. Kecerdasan ganda
 3. Budaya bersih
- c. Mewujudkan suasana kekeluargaan dan ramah terhadap lingkungan
 1. *Teamwork* yang solid
 2. Menjalin silaturahmi yang harmonis dengan *stakeholder*
 3. Menumbuhkan sikap simpati dan empati
- d. Meningkatkan kreatifitas pembinaan siswa (akademik dan non akademik)
 1. Keteladanan

⁷⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 145.

2. Halaqah

3. *On the spot*

Untuk memperjelas arah umum perubahan kebijakan lembaga pendidikan dan menjadi pedoman bagi pendidik untuk bertindak dengan arah yang benar, maka SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto menetapkan tujuan sekolah:

- a. Menerapkan manajemen mutu berbasis sistem sekolah (*quality base school system*) untuk menjamin proses belajar mengajar secara efektif dan integratif dengan nilai-nilai Islam.
- b. Mengembangkan sistem sekolah menuju standar nasional dan internasional.
- c. Menyelenggarakan pendidikan yang mengarahkan pada pembentukan kepribadian muslim melalui pembiasaan di sekolah secara terstruktur dan sistematis.
- d. Menyelenggarakan kegiatan belajar yang memanfaatkan seluruh sumber belajar untuk melayani seluruh kecerdasan ganda (fitrah) yang dimiliki oleh anak didik.
- e. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan quantum.
- f. Menyelenggarakan strategi rekayasa kurikulum dalam proses belajar mengajar untuk mencapai nilai Ujian Nasional terbaik:
 1. Ranking 1 Kabupaten (Negeri dan Swasta)
 2. Ranking III Propinsi (Swasta)

3. Ranking X Propinsi (Negeri dan Swasta)

- g. Menyelenggarakan program bina prestasi akademik dan non akademik dalam bentuk kelompok khusus untuk meningkatkan citra sekolah di tingkat nasional dan internasional.

3. Wawasan Pendidikan SMP Al Irsyad Purwokerto

Untuk meraih visi lembaga diperlukan misi yang jelas dan operasional. Tetapi keberadaan dan operasionalisasi pada tiap misi harus didukung pula dengan sistem nilai yang dapat menjadikan *stakeholders* lembaga tersebut fokus dalam meraih visi dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan misi. Itulah sebabnya, sistem nilai tersebut kemudian menjadi semacam wawasan yang kemudian diyakini dan dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan misi lembaga. Ada 10 wawasan pendidikan SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, yaitu:⁷⁷

a. Islam Agama yang sempurna dan *rahmatan lil'alam*

Al Irsyad memiliki komitmen terhadap pendidikan yang mampu menumbuh kembangkan anak didik guna terwujudnya masyarakat beradab dan berakhlak Islami yang mampu bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan seluruh umat. Islam sebagai agama yang sempurna mendasari semua langkah dengan ilmu dan menyediakan perangkat pendukung.

b. Pendidikan anak merupakan tanggungjawab orangtua dan amanah bagi sekolah

⁷⁷ Dokumen Sekolah, *Handbook For Parent* 2015/2016, SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, hlm. 8.

Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab orangtua, sedangkan Al Irsyad berperan sebagai fasilitator dengan menyusun kebijakan umum pendidikan, mengembangkan kurikulum dan pengawasan dalam mengembangkan potensi anak didik. Dengan demikian, peranan keterlibatan dan partisipasi orangtua sangat vital bagi upaya pengembangan pendidikan. Tugas utama sekolah adalah membantu mengembangkan potensi dan minat anak didik untuk membangun masa depan mereka, memasuki dunia yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya.

c. Kita semua adalah siswa sekaligus guru

Al Irsyad tidak hanya mengandalkan *transfer* antara guru dan siswa yang berlangsung di ruang kelas melainkan lebih dari itu memiliki agenda untuk membangun sebuah masyarakat pembelajarn (*learning society*). Masing-masing pihak yang terlibat ikut berperan sebagai guru dan sekaligus sebagai siswa, karena setiap orang haruslah senantiasa belajar dan berbagi kepada orang lain.

d. Era globalisasi dan teknologi adalah nyata

Menyadari sepenuhnya bahwa pergaulan antar bangsa berlangsung semakin intensif, dimana batas geografis dan budaya sudah bisa terhubung melalui teknologi modern dan mobilitas masyarakat, maka kita siap atau tidak siap sesungguhnya sudah masuk dalam jaringan masyarakat global.

e. Setiap anak adalah bintang dengan potensinya masing-masing

Sebagai makhluk yang dicipta, setiap pribadi anak pada fitrahnya adalah suci dengan derajat dan hak-hak yang sama, sekalipun dengan potensi, minat, dan pertumbuhan pribadi yang berbeda-beda. Tugas sekolah dan orangtua adalah memberikan fasilitas, dorongan dan bimbingan pada anak didik untuk mengembangkan potensi dan minatnya dalam lingkungan yang beradab, yang di dalamnya tumbuh kultur sekolah yang saling menghargai kelebihan dan memaklumi kekurangan masing-masing. Program sekolah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan setiap anak didik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemandirian.

f. Pengembangan kepribadian guna membentuk kemandirian dan kepemimpinan

Pengembangan kepribadian menyangkut aspek pengembangan kecerdasan emosi (*emotional intelligent*), kecerdasan spiritual (*spiritual intelligent*), kecerdasan hati, dan kecerdasan lain. Pendidikan yang hanya menekankan aspek IQ (*intelectual quotient*) tanpa diimbangi aspek intelegensi yang berkaitan dengan kepribadian akan menjadikan anak sebagai seorang spesialis, tetapi kurang mampu mandiri dan menjadi pemimpin masyarakat. Program sekolah harus dapat memberi anak didiknya berbagai skill, kreativitas, tantangan, fleksibilitas, pengembangan diri, dan memberi dorongan agar anak didik menjadi produktif dan menjadi muslim yang bertanggung jawab.

g. Semua SDM adalah guru

Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dari petugas K5 sampai KS adalah guru. Untuk memberi motivasi dan tanggungjawab mendidik sekaligus sebagai penghargaan setiap SDM dipanggil dengan sebutan ustadz atau ustadzah. Guru maupun karyawan haruslah memiliki kompetensi dan tanggung jawab untuk mendukung keberhasilan peserta didik.

h. Muatan dan metode harus unggul agar sekolah menjadi unggul

Kurikulum Al Irsyad tetap mengikuti rambu-rambu Pendidikan Nasional. Selaras dengan hal tersebut dikembangkan dan diperkaya mengingat kebutuhan-kebutuhan anak didik yang harus dipenuhi. Kurikulum terpadu diterapkan agar anak didik dapat memiliki kecakapan menghubungkan antara satu pelajaran dengan yang lain dan mampu mengaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, karena sesungguhnya sifat ilmu itu saling berkaitan. Dengan kurikulum terpadu pemanfaatan waktu juga efisien untuk menyelesaikan beban kurikulum yang ada. Al irsyad menempatkan anak didik sebagai subyek, sehingga pembelajaran lebih menekankan pendekatan “*student active learning*” dimana para guru lebih berperan sebagai fasilitator dan stimulator, sedangkan yang lebih aktif adalah siswa. Pendekatan ini berarti juga menerapkan asosiasinya seperti *contextual learning*, *quantum learning*, dan *quantum teaching*. Perkembangan anak didik yang berbeda mengharuskan pendekatan pembelajaran yang mampu memerhatikan

setiap siswa secara individu dan melihat potensi yang mereka miliki. Suasana belajar yang menyenangkan, supportif, aman, dan nyaman diharapkan dapat memberikan motivasi siswa untuk selalu berprestasi. Kerjasama yang baik antara sekolah, guru dan siswa sangat diharapkan.

i. Mutu terwujud bukan otomatis tetapi harus dikelola

Semangat dalam membuat program-program baru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anak didik Al Irsyad. Seluruh staf dan guru serta manajemen selalu berusaha membuat lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan tantangan kepada anak didiknya. Mutu sekolah terwujud dengan dikelola, mulai dari *input*, proses, dan *output* dikendalikan agar *outcome* memiliki daya guna. Tujuan manajemen adalah perbaikan yang terus menerus. Pedoman pengelolaan mutu disusun sebagai kontrol dan parameter kinerja dan mutu sekolah. Sebagai bentuk kesungguhan mewujudkan mutu, Al Irsyad mengupayakan dalam suatu Sistem Manajemen Mutu (SMM).

j. Itu semua adalah ibadah

Kehidupan ini bermakna dan indah dengan berbagai aktivitas yang dicintai dan diridhai Allah Swt. Pendidikan penuh dengan amal yang tidak terputus, ilmu yang diajarkan dan diamalkan, harta yang diinfakkan dalam pendidikan dan membentuk anak yang senantiasa mendoakan orangtuanya. Dunia merupakan tempat menanam dan akhirat merupakan tempat menuai.

4. Budaya Siswa-siswi

Budaya adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan diharapkan berlanjut ketika di rumah dan di masyarakat. Semua ustadz/ustadzah harus membimbing, dan mengingatkan terus menerus agar budaya ini benar-benar menjadi kebiasaan dan perilaku sehari-hari siswa SMP Al Irsyad Purwokerto. Dalam proses pembiasaan budaya siswa tidak ada konsekwensi logis yang memberatkan siswa. Konsekwensi yang diterapkan adalah dengan cara menjadi teladan dalam proses pembudayaan sesuai indikator yang tercantum, saling mengingatkan antar guru dan siswa secara langsung dan terus menerus. Konten Budaya Siswa⁷⁸:

a. Thaharah

Siswa mengantri giliran berwudlu dengan tertib, melipat lengan baju ke atas siku, melipat celana sampai lutut, membaca basmalah sebelum bersuci/berwudlu, melaksanakan wudlu dengan tertib, berdoa setelah berwudlu, dan menuju tempat shalat dengan tenang

b. Shalat

Masuk masjid mendahulukan kaki kanan sambil berdo'a, mengisi shaf pertama atau shaf yang kosong, melaksanakan sunnah qabliyah/tahiyatul masjid, tadarus/muroja'ah Alquran dengan sirr (kegiatan sambil menunggu salat), setelah iqomah berdiri dengan tenang tanpa suara, meluruskan dan merapatkan shaf. Selanjutnya,

⁷⁸ Dokumen Sekolah, *Handbook For Parent* 2015/2016, SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, hlm. 15.

melafalkan bacaan salat(sir) sesuai buku panduan atau mendengarkan bacaan imam ketika salat jahar, melaksanakan shalat dengan khusyu' dan tertib. Setelah shalat melaksanakan prosedur dzikir dan doa sesuai prosedur, melaksanakan shalat sunnah ba'diyah, melaksanakan kulim (kuliah lima menit) untuk siswa kelas 8 di sekolah.

Ketika shalat Jum'at: Mendengar khatib dengan serius dan tidak berbicara, tetap berada di dalam masjid ketika khatib berkhotbah dan menahan diri untuk tetap tenang dan tidak tidur.

c. Al Qur'an

Siwa wajib bersuci sebelum membaca Alquran, membawa Al Quran di atas dada, membaca Al Qur'an setiap hari minimal 7 menit dan berusaha membaguskan suara ketika membacanya

d. Orangtua

Berpamitan ketika pergi, berdo'a untuk kedua orangtua, membantu pekerjaan rumah, memenuhi panggilan orangtua, tidak berkata kasar atau membantah orangtua, peduli terhadap kondisi orang tua

e. Guru/Ustadz

Mengucapkan salam ketika bertemu, berlaku sopan dan bertutur santun, taat kepada guru dan membantu guru

f. Teman

Mengucapkan salam ketika bertemu, berjabat tangan dengan sesama jenis, menghargai perbedaan dan tidak mencela, meminta maaf ketika berbuat salah dan bertanggung jawab, meminta ijin ketika meminjam

barang milik teman, memberi nasehat, berbicara dengan santun dan peduli kepada teman

g. Lingkungan

Membuang sampah pada tempat yang disediakan dan mau memungut sampah yang berserakan, merawat barang/fasilitas sekolah dan memberi identitas pada barang milik pribadi

h. Kemandirian

Senantiasa berpenampilan rapi dan bersih, berpakaian sesuai syariat, memiliki kesadaran untuk belajar dan mengelola diri sendiri (contoh : keuangan, cuci dan setrika pakaian).

i. Komunikasi

Menyampaikan gagasan/ide dengan sopan, mampu berbicara di depan publik minimal lima menit dan bisa berdiplomasi

j. Kepribadian

Jujur, percaya diri, disiplin, tabah, cekatan, memiliki jiwa wirausaha dan bertanggungjawab

5. Data Pendidik dan Peserta Didik

a. Pendidik

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada

perguruan tinggi.⁷⁹ Tenaga Pendidik di Al Irsyad berjumlah sebanyak 61 orang yang terdiri dari 58 lulusan S1 dan 3 lulusan S2. Guru-guru di Al Irsyad terdiri dari lulusan- Universitas dalam maupun luar Negeri.

b. Penanggung Jawab dan Koordinator

1. Penanggung Jawab (PJ)

Untuk mendukung peningkatan akhlak mulia melalui Program Pendidikan akhlak (PPA), Al Irsyad membentuk Penanggung Jawab (PJ) dan Koordinator yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir operasional kegiatan siswa sehingga semua kegiatan sekolah dapat maksimal dalam mendukung PPA.⁸⁰

1.1 Daftar Penanggung Jawab SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Nama Guru	Keterangan
1.	Taufik Adi Pamungkas, S.Pd.Jas	PJ Ekstrakurikuler Putra
2.	Sulistiani, S.Si	PJ Ekstrakurikuler Putri
3.	Darsitun, M.Pd.I	PJ Biah Islamiyyah Putra
4.	Ririn Nursanti, M.Pd.I	PJ Biah Islamiyyah Putri
5.	Sarah Abdurahmah, Lc	PJ Bilingual
6.	Muhsin, S.Pd.I	PJ Al Qur'an
7.	Nur Amalina, S.Psi	PJ Inklusi
8.	Teguh Susila, S.Psi	PJ Bimbingan Konseling
9.	Nur Amalina, S.Psi	PJ Inklusi
10.	Untari Sri Hariani, S.Si.,M.Si	PJ Lab.MIPA

⁷⁹ Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2.

⁸⁰ Dokumen Sekolah, *Handbook For Parent* 2015/2016, SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, hlm. 25.

11.	Diana Tri Rahayu, S.Pd	Koord. Media & Publikasi
12.	Nurul Dwi Hayati, S.Pd.I	Koord. Pramuka & Lab. Komputer
13.	Masnun Alim	Koord. Kebersihan

c. Data Siswa

Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah siswa sebanyak 718 anak. 234 siswa dari kelas IX yang terdiri dari 8 kelas. 245 siswa dari kelas VIII yang terdiri dari 9 kelas. Dan 234 siswa dari kelas VII yang terdiri dari 8 kelas.⁸¹

1.2 Daftar Siswa SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto Tahun Pelajaran 2016/2017

Level	Putra	Putri	Total
VII	117	122	239
VIII	128	117	245
IX	122	112	234
Total	367	351	718

6. Struktur Kurikulum

Untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan optimalisasi potensi guru dan siswa, maka secara internal kurikulum yang diterapkan adalah KTSP modifikasi, sesuai kebutuhan esensi murid, visi dan misi

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Mustamim Luthfi, S.Pd.I, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, 7 Juni 2016.

SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Berikut ini gambaran kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto⁸²:

**Tabel 7.1 Struktur Kurikulum
SMP Al Irsyad Al Islamiyyah
Tahun Ajaran 2016/2017**

No	Mata Pelajaran	VII	VIII	IX
1	Fiqh	2	2	2
2	Hadis	1	1	1
3	Tarik	1	1	1
4	Aqidah	1	1	1
5	Bahasa Arab	2	2	2
6	Bahasa Indonesia	4	4	6
7	Bahasa Inggris	4	6	6
8	Matematika	5	6	6
9	IPA	5	6	6
10	IPS	4	4	4
11	PKn	2	1	1
12	TIK	2	2	2
13	SBK/Bahasa Jawa	1	1	2
14	Olahraga	2	2	2
15	Tahfidz	6	4	2
16	Prakarya	1	-	-

⁸² Hasil Wawancara dengan Ummi Palupi, S.Tp, Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto tanggal 8 Juni 2016.

17	Halaqoh	2	2	1
18	Ekstrakurikuler	2	2	-
		48	48	48

Semester I

Keterangan :

Mata pelajaran IPA kelas VII menggunakan terpadu antara Fisika dan Biologi. Mata Pelajaran IPA kelas VIII semester I adalah Biologi dan semester II adalah Fisika.

B. Proses Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Al Irsyad

Identifikasi secara harfiah adalah menemukan atau menemukenali. Setelah dilakukan identifikasi, kondisi seseorang dapat diketahui, apakah pertumbuhan dan perkembangannya normal atau tidak. Apabila mengalami kelainan atau penyimpangan, maka guru dapat mengelompokkan atau mengidentifikasi sebagaimana dalam kelompoknya: apakah termasuk anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa atau bahkan anak berbakat dan sebagainya. Dengan diketahui atau diidentifikasinya anak di awal pembelajaran maka guru tentu akan lebih baik dalam memberikan pelayanan selanjutnya apalagi kalau sampai diketahui anak tersebut sebagai anak berkebutuhan khusus.

Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan secara kasar apakah seorang anak tergolong anak dengan kebutuhan khusus atau bukan. Sebagaimana biasanya

identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orang tuanya, pengasuhnya, atau gurunya, maka guru dapat melakukan identifikasi siswa sebagai peserta didiknya. Adapun langkah selanjutnya yaitu asesmen, maka guru masih memungkinkan melakukan itu dengan catatan guru tersebut memiliki kemampuan dan wawasan yang memadai.

Identifikasi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut penjarangan, dan asesmen sebagai penyaringan. Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi atau data apakah seorang anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak. Hasil dari identifikasi dan asesmen akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembelajaran selanjutnya sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: (1) penjarangan (screening), (2) pengalih-tanganan (referral), (3) klasifikasi, (4) perencanaan pembelajaran, dan (5) pemantauan kemajuan belajar. Pada tahap pertama, identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, sehingga anak tergolong kebutuhan khusus. Tahap pertama dilakukan dari awal penerimaan siswa baru. Setiap siswa yang mendaftar di Al Irsyad akan melalui tahap-tahap seleksi yang ketat, dimulai dari tes tertulis dan juga wawancara. Wawancara juga dilakukan kepada wali murid untuk mendapatkan informasi secara utuh tentang kondisi anak yang akan masuk ke Al Irsyad. Wawancara dengan murid dan wali murid juga bisa dijadikan tahap pertama dalam penyaringan

apakah siswa termasuk anak berkebutuhan khusus atau bukan. Wawancara dengan wali murid bisa menjadi wadah bagi wali murid untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang kondisi murid. Setelah siswa menjadi siswa di Al Irsyad, pemantauan anak terus dilakukan. Jika memang ternyata ditemukan gejala-gejala yang mengarah kepada anak berkebutuhan khusus, maka dilanjutkan dengan pengalihanganan.⁸³

Tahap kedua, pengalihanganan (*referral*). Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjarangan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain (tenaga profesional) dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dulu (*referral*) seperti psikolog, dokter, orthopedagog, atau *therapis*, baru kemudian ditangani oleh guru. Baik untuk kelompok satu ataupun dua semuanya diawali dari identifikasi yang benar.

Pada tahap klasifikasi atau tahap ketiga, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Apabila berdasar pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut seperti; pengobatan, *therapy*, latihan-latihan khusus, dan sebagainya maka guru tinggal mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi guru tidak mengobati atau melakukan *therapy*, melainkan sekedar

⁸³ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 7 Desember 2016

meneruskan kepada orang tua tentang kondisi anak yang bersangkutan. Guru hanya akan membantu siswa dalam hal pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan kondisi anak. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup bahwa anak yang bersangkutan memerlukan penanganan lebih lanjut, maka anak dapat dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus. Kegiatan klasifikasi ini memilah-milah mana anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan mana yang langsung dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler.⁸⁴

Tahap keempat dan kelima adalah perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Tahap keempat dan kelima tentu dilakukan apabila tahapan satu hingga tiga telah dilakukan dengan benar. Agar guru dapat mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dengan benar maka mereka perlu mendapatkan wawasan tentang anak berkebutuhan khusus dengan benar pula. Wawasan mengenai anak berkebutuhan khusus tersebut tentu meliputi pengertiannya, ciri-ciri atau karakteristik yang nampak dan sifat-sifatnya yang tidak langsung nampak. Wawasan mengenai anak berkebutuhan khusus bagi guru diberikan sejak awal perekrutan tenaga pendidik. Akan ada waktu khusus yang disediakan oleh sekolah untuk memberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dengan bekal pemahaman yang benar inilah maka guru paling tidak akan sedikit terhindar persepsi yang salah. Tentu bekal pemahaman tentang anak berkebutuhan saja tidaklah cukup, maka tahap selanjutnya yang harus

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 7 Desember 2016

dilakukan adalah belajar melakukan identifikasi dan mendiskusikan dengan sesama guru ataupun orang yang dianggap lebih tahu mengenai anak berkebutuhan khusus ini termasuk mendiskusikan hasil interpretasi yang telah dan akan dilakukan. Mengasah kemampuan identifikasi anak berkebutuhan khusus ini dapat dilakukan kapan, dimana saja seperti dalam kelompok kerja guru, meminta penyuluhan ataupun mencari dan membaca referensi yang terkait dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus.⁸⁵

C. Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad

1. Desain Kurikulum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, teknik penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁶

Perangkat-perangkat kurikulum sekolah meliputi silabus, Rencana Program Pembelajaran atau RPP, dan bahan ajar, dan alat evaluasinya.

Ummi Palupi menjelaskan bahwa⁸⁷:

“Pada umumnya, Al Irsyad menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah reguler. Yang dimaksud dengan penggunaan kurikulum disini adalah penggunaan standar isi (si) dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang sama dengan sekolah umum yang diterbitkan oleh BNSP. Silabus dan rancangan program pembelajaran (RPP) yang digunakan di Al Irsyad juga pada umumnya sama. Artinya sebagian besar guru-guru di Al

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 7 Desember 2016

⁸⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 19

⁸⁷ Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto

Irsyad hampir tidak membedakan RPP bagi siswa umum dan bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Meskipun RPP-nya sama namun dalam pelaksanaannya, bagi anak berkebutuhan khusus menerapkan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan kepada peserta didik lainnya.”

Namun demikian, karena peserta didiknya berbeda karakteristiknya, maka sebagian rencana program pembelajarannya disusun berbeda pula. Terlebih lagi karakteristik setiap peserta didik berkebutuhan khusus sangat spesifik dan individual, oleh karena itu program pembelajarannya disusun berdasarkan kebutuhan individu peserta didik yang bersangkutan. Program pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik dikenal sebagai program pendidikan individu atau *individualized education program* (IEP). IEP membahas seluruh ranah kebutuhan siswa, yaitu akomodasi, layanan, dan dukungan yang perlu disediakan di lingkungan pendidikan inklusi. IEP juga merupakan cara untuk mendokumentasikan kemajuan siswa.⁸⁸

Seperti yang telah diuraikan di atas, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum. Hal ini dilakukan hampir di semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Seperti yang dikemukakan oleh kepala sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokero bahwa,

“Penggunaan kurikulum tidak dibedakan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak lainnya, hanya pada proses

⁸⁸ Marilyn Friend dan William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi Panduan Praktis untuk Mengajar*, terj. Annisa Nuriowandari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 109.

pembelajaran ketika anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian khusus, mereka dipisahkan dari anak-anak lainnya. Artinya penyesuaian kurikulum terjadi pada saat proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dilakukan karena hambatan dan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus bervariasi.”⁸⁹

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, Al Irsyad menggunakan 3 (tiga) model kurikulum, yaitu kurikulum umum, kurikulum modifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan.⁹⁰ Implikasi digunakannya tiga jenis kurikulum dan perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam pada sekolah inklusi ini, maka dibutuhkan sistem penilaian fleksibel yang dapat dipergunakan untuk menilai kompetensi belajar semua peserta didik. Kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau materi.

Muhsin menjelaskan bahwa,

“Sebagai sekolah Islam, kurikulum di Al Irsyad tidak hanya sekedar bertujuan membuat anak-anak cerdas secara akademik, akan tetapi juga bertujuan menjadikan anak-anak sebagai pribadi yang shaleh/shalehah. Anak-anak di Al Irsyad dibekali juga dengan kurikulum keagamaan yang menyiapkan mereka agar dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi semua laranganNya. Karena hakikatnya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Misal, meski berkebutuhan khusus, ABK di Al Irsyad diajarkan bagaimana membaca Al Qur’an dengan baik. Di tahun pertama mereka mendapatkan 6 jam pelajaran Al Qur’an setiap pekan, di tahun kedua mereka mendapatkan 4 jam pelajaran Al Qur’an setiap

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Nandi Mulyadi, M.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 14 Juni 2016

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ummi Palupi, S.TP, Wakil Kepala Kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 15 Juni 2016

pekan, dan di tahun ketiga mereka belajar Al Qur'an 2 jam setiap pekan. Pelajaran Al Qur'an tidak hanya sebatas mengajarkan bagaimana membaca Al Quran dengan baik dan benar, tetapi juga disertai dengan setoran hafalan juz 29. Selain Al Qur'an, anak-anak juga dibiasakan untuk shalat berjamaah di masjid, puasa sunnah, shalat dhuha sebelum pembelajaran dimulai, dan pembiasaan-pembiasaan baik lainnya.⁹¹

Keberagaman peserta didik membuka kemungkinan untuk menyusun kurikulum yang berbeda dengan yang lainnya melalui proses adaptasi kurikulum yang diinginkan, termasuk dalam menyusun program pembelajaran individual.

Nur Amalina mengungkapkan bahwa:

“Beberapa guru di Al Irsyad merasakan kesulitan menyusun program pembelajaran individual. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman dan kompetensi guru dalam menyusun program pembelajaran individual tersebut. Alasan lain, karena belum ada kesepakatan atau pengakuan dari dinas pendidikan setempat terkait dengan model dan bentuk program pembelajaran individual tersebut. Berkaitan dengan karakteristik peserta didik, guru-guru juga kesulitan untuk menyusun instrumen penilaian dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Hal ini dirasakan terutama pada saat pelaksanaan ujian semester dan kenaikan kelas. Padahal semestinya rencana pembelajaran individual sangat disarankan digunakan di sekolah inklusi. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik yang terdapat di sekolah inklusi tersebut.”⁹²

Desain kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi harus mempertimbangkan dua hal, yaitu karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Penyusunan kurikulum di sekolah inklusi sebaiknya bertujuan untuk membantu peserta didik dalam

⁹¹ Hasil wawancara dengan Muhsin, S.Pd.I , Penanggung Jawab Al Qur'an SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 17 Juni 2016.

⁹² Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 17 Juni 2016

mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam seting sekolah inklusi; dan membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Seperti yang telah disebut di muka terdapat tiga model pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum sekolah reguler, kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan.

Pada model kurikulum reguler, anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum umum, sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya. Adapun pada model kurikulum reguler yang dimodifikasi anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum perpaduan antara kurikulum umum dengan kurikulum pembelajaran individual. Operasional pengembangan kurikulum ini, dilakukan dengan cara memodifikasi kurikulum umum disesuaikan dengan potensi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dengan kurikulum modifikasi ini diharapkan ABK dapat mengikuti pembelajaran pada kelas umum secara klasikal bersama anak umum lainnya.⁹³

Pada model kurikulum individual anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, dalam format program

⁹³ Hasil wawancara dengan Ummi Palupi, S.TP, Wakil Kepala Kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 22 Juni 2016

pembelajaran individual. Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, kurikulum ini sering disebut program pembelajaran individual, yang dikembangkan secara khusus oleh guru dan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi.⁹⁴ Model program pembelajaran individual ini dipersiapkan untuk yang tidak dapat mengikuti kurikulum maupun kurikulum modifikasi. Indikator pencapaian hasil belajar program pembelajaran individual dirumuskan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh guru pendidikan khusus bersama tim ahli terkait.

Program pembelajaran individual merupakan rencana pengajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh tim terdiri dari orangtua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama. Idealnya, program pembelajaran individual tersebut disusun oleh tim terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, tenaga ahli dan profesi terkait, orangtua atau wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus, serta peserta didik yang bersangkutan.

Pada penyusunan program pembelajaran individual hendaknya memerhatikan prinsip anak berkebutuhan khusus berikut: berorientasi pada

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 17 Juni 2016.

peserta didik, sesuai potensi dan kebutuhan anak, memerhatikan kecepatan belajar masing-masing, dan mengejar ketertinggalan serta mengoptimalkan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Adapun komponen-komponen program pembelajaran individual sekurang-sekurangnya terdiri atas: deskripsi tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus sekarang, tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus), rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lain yang terkait, termasuk seberapa besar peserta didik dapat berpartisipasi di kelas reguler, sasaran, ketercapaian sasaran, metode, dan cara mengevaluasinya.

Kegiatan pembelajaran pada model kelas tertentu mungkin berbeda dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada model kelas yang lain. Pada model kelas reguler, bahan belajar antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal mungkin tidak berbeda secara signifikan; namun pada model kelas reguler dengan kluster, bahan belajar antara siswa luar biasa dengan siswa normal biasanya tidak sama, bahkan antara sesama anak berkebutuhan khusus pun dapat berbeda. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran pada setting inklusi perlu mendapat perhatian penuh dari setiap guru.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Al Irsyad, Al Irsyad menyiapkan tenaga pendidik agar dapat memahami konsep dan pelaksanaan pendidikan inklusi yang benar. Penyiapan tenaga pendidikan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan kepada guru-guru.

Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, tenaga ahli, atau LSM yang memiliki konsen dalam pendidikan inklusi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nandi Mulyadi, yaitu:

“Hingga kini memang Al Irsyad sedang berusaha agar pengetahuan mengenai pendidikan inklusi dapat dipahami dengan baik oleh para pendidik. Persiapan tenaga pendidik dilakukan sejak awal perekrutan tenaga pendidik. Setiap pendidik yang akan mengajar di Al Irsyad wajib mengikuti *job training* selama satu bulan, salah satu materi yang diberikan adalah bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah. Hal ini dilakukan agar semua pendidik bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain itu, selama *job training* semua guru juga diajarkan bagaimana membaca Al Qur’an dan diberi waktu menghafal 1 juz dalam waktu satu bulan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan tenaga pendidik yang tidak hanya sekedar pintar secara akademik namun juga shaleh sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Kami sendiri memiliki kebijakan agar anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas tidak lebih dari 2 orang sehingga guru sendiri tidak kerepotan dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Tugas guru Guru Pendamping Khusus nantinya adalah membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti pembelajaran. Kami sendiri menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi dalam menyelenggarakan pelatihan untuk guru-guru di sekolah agar dapat melayani dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah”⁹⁵

Ibnu Rochi menambahkan,

“Sebagai sekolah Islam, Al Irsyad menerapkan standar hafalan Al Qur’an bagi semua pendidik. Pendidik yang diangkat menjadi manajemen diwajibkan menghafal juz 29 dan 30. Dalam setiap semester harus menyetorkan ¼ juz setoran wajib dan muraja’ah semua juz yang sudah dihafal. Target hafalan Guru PAI adalah 4 juz (juz 29,30,1 dan 2). Untuk Guru Al Qur’an diwajibkan setoran 5 juz (juz 26, 27, 28, 29, 30). Sedangkan untuk guru umum diwajibkan menghafal juz 29 dan 30. Baik pihak manajemen, guru PAI, guru Al Qur’an, maupun guru umum, semua memiliki jadwal setoran dan target selesai masing-masing. Al Qur’an merupakan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Nandi Mulyadi, M.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 14 Juni 2016

salah satu program unggulan di Al Irsyad, untuk mewujudkan hasil yang maksimal, pendidik juga diwajibkan untuk menghafal.”⁹⁶

Dari segi tingkat pendidikan, pendidik di Al Irsyad adalah lulusan S1 dan S2 dengan latar belakang pendidikan. Kalaupun ada yang latar belakang pendidikannya di luar bidang pendidikan, tetapi mereka diakui memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan. Al Irsyad selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pendiknnya baik di bidang perkembangan siswa dan permasalahannya, serta strategi pembelajaran yang efektif untuk kelas inklusi. Guru-guru yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pendidikan luar biasa misalkan, mereka senantiasa berdiskusi untuk berbagi pengetahuan dengan guru lainnya yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, tentang layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Selain itu guru-guru juga sering kali dikirim ke setiap pelatihan tentang pendidikan inklusi yang diselenggarakan oleh lembaga lain.⁹⁷

Dengan begitu semua pendidik di Al Irsyad memahami betul bahwa permasalahan yang dihadapi di kelas inklusi tidak hanya siswa normal akan tetapi juga siswa dengan kebutuhan khusus. Karena itu kesabaran dan keuletan adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah inklusi.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibnu Rochi, Lc, Penanggung Jawab Kurikulum PAI Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 7 Desember 2016.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Nandi Mulyadi, M.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 14 Juni 2016

Pada saat menangani siswa berkebutuhan khusus, guru kelas dapat dibantu juga oleh guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan. Siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan adalah siswa yang mengalami hambatan dalam komunikasi, bahasa (*reseptif-ekspresif*), sosialisasi, perilaku dan akademik.

Tugas guru pendamping di Al Irsyad adalah membimbing dan mengarahkan siswa berkebutuhan khusus agar dapat beradaptasi di sekolah, di bidang akademik dan atau bidang non akademik. Selain itu, melakukan *one to one teaching* untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam memahami materi yang diajarkan, menjembatani komunikasi siswa berkebutuhan khusus dengan guru, teman, dan pegawai sekolah. Tugas lainnya adalah berkoordinasi dengan orang tua dan sekolah dalam memantau perkembangan anak, serta memantau siswa berkebutuhan khusus yang menjadi tanggungjawabnya selama di sekolah.⁹⁸

Selain dibantu oleh guru pendamping, guru di Al Irsyad juga dibantu oleh siswa-siswa normal lainnya yang ada di kelas yang berperan sebagai *peer tutoring* yaitu siswa sebagai tutor. Mereka dijadikan model dan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada temannya siswa berkebutuhan khusus.⁹⁹

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Nandi Mulyadi, M.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 14 Juni 2016

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 17 Juni 2016.

Dengan cara seperti ini, siswa berkebutuhan khusus merasa dihargai keberadaannya, sehingga bisa meningkatkan harga dirinya. Sebaliknya bagi siswa normal lainnya, keadaan temannya yang berkebutuhan khusus diharapkan dapat dijadikan pelajaran untuk banyak bersyukur keberadaannya yang normal. Disamping itu, mereka diharapkan dapat belajar tentang perbedaan individu dan bagaimana menyikapinya dengan cara menunjukkan sikap toleransi.

Selain dibantu oleh guru pendamping, guru juga dibantu oleh penanggung jawab pendidikan inklusi dan pihak bimbingan konseling. Guru-guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa bertugas bekerjasama dengan guru dan atau guru pendamping dalam menangani siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat lebih beradaptasi di lingkungan sekolah. Mereka juga membuat rancangan IEP yang merupakan program siswa berkebutuhan khusus di bidang akademis dan non-akademis, dan melakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, mereka membuat IEP final dengan cara berkoordinasi dengan guru, guru pendamping, dan pihak-pihak yang terkait antara lain psikolog, terapis, dan orang tua dalam membuat dan menjalankan IEP. Tugas lainnya adalah membuat laporan tertulis mengenai program yang dijalankan serta membuat dan mempresentasikan profil siswa berkebutuhan khusus

mengenai program dan hasil pencapaian mereka selama 1 tahun pelajaran pada pihak yang terkait.¹⁰⁰

Untuk mendukung supaya program inklusi bisa sukses yaitu dengan membuat pelatihan yang dirancang untuk melengkapi gaya mengajar guru. Pelatihan ditujukan pada pengajaran yang kooperatif, kurikulum berbasis penilaian, teknik-teknik manajemen perilaku, kecerdasan ganda, membangun kepercayaan dan mencari jalan keluar dari konflik. Kesuksesan program inklusi juga akan tercapai bila guru melakukan studi banding terhadap satuan pendidikan lain yang program inklusinya sukses. Kesuksesan program inklusi juga tercapai apabila didukung oleh sebuah tim profesional, dukungan administratif, organisasi dan aturan yang fleksibel, serta seluruh stakeholder sekolah konsensus pada nilai-nilai yang mendukung inklusi.

Perbedaan karakteristik setiap siswa berkebutuhan khusus, memerlukan kemampuan guru berkaitan dengan cara mengkombinasikan kemampuan dan bakat setiap siswa dalam kemampuan berpikir, melihat, mendengar, berbicara dan bersosialisasi yang ditujukan pada tujuan akhir pembelajaran. Kemampuan guru semacam ini mempunyai tujuan pembelajaran yang diarahkan kepada hasil akhir berupa kemandirian setiap siswa untuk dapat hidup dan menghidupi diri pribadinya tanpa bantuan khusus dari orang-orang sekitarnya dalam kehidupan nyata setelah siswa bersangkutan selesai menyelesaikan program-program pembelajaran

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, 17 Juni 2016.

di sekolah. Hasil akhir dari program pembelajaran semacam ini secara konseptual adalah mengarahkan para siswa berkebutuhan khusus untuk mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif. Perilaku adaptif diartikan sebagai suatu kemampuan peserta didik untuk dapat mengatasi secara efektif terhadap keadaan-keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat lingkungannya. Perilaku adaptif secara khusus merupakan kemampuan berperilaku merespon tuntutan lingkungan.

Dengan demikian, kemampuan guru dalam memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus, dan membuat serta melaksanakan program layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kekhususannya, akan sangat menentukan keberhasilan program pendidikannya. Oleh karena itu, kompetensi pendidik di sekolah inklusi harus terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menambah wawasannya sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik untuk siswa berkebutuhan khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus¹⁰¹.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41

paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus.

Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus dipenuhi oleh sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Dalam hal tidak tersedia Guru Pembimbing Khusus pada sekolah yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lain.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nandi Mulyadi:

“Kebijakan sarana prasarana sendiri mempergunakan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekolah. Jika memang dibutuhkan, sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membantu pihak sekolah dengan catatan pihak sekolah mengajukan proposal permohonan bantuan mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.”¹⁰²

¹⁰² Hasil wawancara dengan Nandi Mulyadi, M.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 14 Juni 2016

Dapat dipahami bahwa Al Irsyad memiliki komitmen tinggi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan profesional yang dimaksud dalam peraturan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana¹⁰³.

Sebagai sekolah Islam, sarana pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, disamping komponen-komponen lainnya seperti: peserta didik, program atau kurikulum, ketenagaan, pembiayaan, manajemen, proses belajar mengajar, hasil, konteks/lingkungan, dan dampak pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan sarana pembelajaran pendidikan agama Islam memerlukan pertimbangan dari komponen-komponen lain yang bersifat terpadu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pendidikan Islam di Al Irsyad memiliki berbagai sarana material yang diwujudkan dalam bentuk media pendidikan, misalnya: sarana ibadah, perlengkapan belajar mengajar, dan guru-guru yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Selain itu juga memiliki sarana-sarana penunjang yang lebih berhubungan dengan metode-metode yang bersifat

¹⁰³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009

psikologis, seperti pelajaran lewat cerita, dialog, argumentasi, ilustrasi, pencontohan atau melalui pemahaman atas benda-benda konkret.

Berbagai sarana pendidikan agama di Al Irsyad sangat menunjang sekali kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Sebagai contoh adalah komputer-komputer yang bisa dimanfaatkan siswa untuk mencari materi-materi yang menunjang tema yang sedang dibahas oleh guru agama. Materi-materi yang sudah didapatkan dari media komputer kemudian dipresentasikan di depan kelas dengan memanfaatkan fasilitas *slide projector* yang ada di ruangan kelas.

Demikian juga dengan alat-alat peraga yang ada di ruang belajar agama merupakan sarana pembelajaran yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran agama, karena biasanya siswa akan lebih dapat memahami pelajaran apabila ditunjang dengan media yang menarik. Apalagi untuk siswa berkebutuhan khusus yang kurang bisa memahami apabila diajak berpikir hal-hal yang sifatnya abstrak, maka penjelasan guru yang disertai dengan gambar-gambar yang menarik akan membantu mereka untuk bisa memahami materi yang diajarkan. Selain itu, hasil kreasi siswa yang ditempel di dinding kelas, juga akan dapat membantu siswa lebih memahami materi disamping dapat menumbuhkan rasa bangga pada diri siswa.

Demikian juga dengan sarana pendidikan agama Islam seperti masjid merupakan salah satu fasilitas ibadah yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai agama pada jiwa siswa serta menumbuhkan

semangat untuk beribadah sesuai kewajiban yang diembannya. Menurut Husni Rahim, Mushalla atau Mesjid merupakan sarana pendidikan agama yang paling utama. Mushalla dan Masjid dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan agama terutama dalam aspek pembiasaan dan pengamalan agama. Sekolah yang baik seharusnya membiasakan semua anak didiknya untuk shalat dzuhur berjamaah, karena dalam kesempatan berjama'ah banyak hal yang dapat diperoleh oleh anak didik secara tidak langsung.¹⁰⁴

Pemanfaatan sarana ibadah di Al Irsyad tidak hanya dipakai untuk praktik ibadah pelajaran pendidikan agama Islam saja, tetapi secara rutin dipakai untuk shalat dzuhur dan ashar berjamaah setiap hari yang merupakan program wajib bagi siswa. Jumlah sarana ibadah di Al Irsyad tidak hanya satu, tetapi ada beberapa sarana ibadah lainnya berupa ruang khusus untuk pembelajaran pendidikan agama yang sudah didesain khusus supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus untuk praktik ibadah langsung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan fasilitas ibadah dan sarana pembelajaran merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Fasilitas ibadah dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai agama pada jiwa siswa serta menumbuhkan semangat beribadah, sedangkan sarana pembelajaran dapat bermanfaat memperlancar proses belajar mengajar di dalam kelas.

¹⁰⁴ Berdasarkan wawancara dengan Darsitun, M.Pd.I, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

4. Strategi Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum. Mutu pendidikan dan atau mutu lulusan banyak dipengaruhi oleh mutu kegiatan pembelajaran. Jika mutu kegiatan pembelajaran bagus, dapat diprediksi bahwa mutu lulusan bagus, atau sebaliknya, jika mutu kegiatan pembelajaran tidak bagus, maka mutu lulusannya juga tidak bagus.

Seiring dengan kemajuan zaman, sudah banyak pembaharuan sistem strategi dan kelembagaan yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Memasuki akhir milenium dua, visi dan misi kelembagaan cenderung lebih humanis dan terintegrasi (inklusi) dengan masyarakat.

Nandi Mulyadi selaku Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Purwokerto Mengatakan,

“Pendidikan inklusi adalah suatu bentuk sistem pendidikan di mana peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peserta didik lainnya. Oleh karena itu, strategi pembelajaran di sekolah inklusi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.”

Fakta menunjukkan bahwa di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi para siswa memiliki kemampuan yang heterogen. Peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi melibatkan peserta didik dari anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus di Al Irsyad memiliki beragam kelainan, seperti yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Inklusi Al Irsyad, Nur Amalina:

“Peserta didik berkebutuhan khusus di Al Irsyad memiliki beragam kelainan antara lain hambatan intelektual, ADD, retradasi mental

ringan, diskalkulia, dan lain-lain. Sebagian besar ABK di Al Irsyad adalah siswa slow learn.”

Pembelajaran di Al Irsyad yang kemampuan siswanya sangat heterogen, berbeda dengan pembelajaran di sekolah reguler pada umumnya yang dianggap memiliki kemampuan heterogen. Para guru di Al Irsyad dipersiapkan untuk mengajar siswa yang mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus, sehingga guru tidak mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Khususnya, pada saat membelajarkan anak-anak berkebutuhan khusus tentang pendidikan agama.

Darsitun menjelaskan bahwa,

“Model pembelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa berkebutuhan khusus di Al Irsyad merupakan model pembelajaran berbasis kompetensi anak. Dengan kata lain dalam proses pembelajaran, teknik, metode, dan strategi guru mengajar disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Dengan memerhatikan kemampuan dan potensinya tersebut diharapkan siswa berkebutuhan khusus memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang diajarkan guru di dalam kelas.”¹⁰⁵

Model pembelajaran ini dapat diterapkan dengan efektif melalui perubahan atau penyesuaian antara kemampuan belajar siswa dengan harapan/target, alokasi waktu, penghargaan/hadiah, tugas-tugas/pekerjaan, dan bantuan yang diberikan pada anak-anak dari masing-masing kelompok yang beragam, meskipun mereka belajar dalam satu kelas, dengan tema dan mata pelajaran yang sama. Misalnya, harapan atau target belajar shalat

¹⁰⁵ Berdasarkan wawancara dengan Darsitun, M.Pd.I, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

fardu untuk anak kelas 7 adalah mampu memahami syarat dan rukun shalat serta mempraktikkan shalat dengan baik dan benar. Untuk siswa yang membutuhkan tingkat layanan sedang, target belajar shalat fardhu hanya sampai mampu mempraktikkan saja. Sedangkan untuk siswa yang membutuhkan tingkat layanan berat, lebih banyak memfokuskan pada keunggulan *visual thinkingnya* (pemahaman konsep melalui pengamatan dengan bantuan gambar, kode, label, simbol atau film dan sebagainya).

Jadi proses layanan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus bukan didasarkan pada bentuk layanan sama rata, sama rasa dan disampaikan secara klasikal, tetapi diarahkan pada pembelajaran yang lebih demokratis dan proporsional sesuai dengan harapan dan target belajar dari masing-masing kelompok siswa tersebut, dan proses belajar siswa tersebut tidak dipisahkan berdasarkan kelompok atau dipisahkan dari komunitasnya, melainkan mereka belajar bersama-sama dengan teman sebayanya di dalam kelas reguler. Apabila program dan proses belajar siswa disesuaikan dengan keberagaman dari setiap kelompok tersebut, maka semua siswa dalam kelas yang sama itu dapat mengikuti proses belajar sesuai dengan porsinya masing-masing.¹⁰⁶

Di lingkungan Al Irsyad yang kondisinya sangat heterogen, guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mampu memilih strategi yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tidak ada satu strategi pembelajaran umum yang paling baik untuk mencapai semua kegiatan

¹⁰⁶ Berdasarkan wawancara dengan Abdul Manan, Lc, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

pembelajaran, karena strategi pembelajaran yang paling baik dan berhasil digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu bagi seseorang atau sekelompok siswa, belum tentu tepat atau baik digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada seseorang atau sekelompok siswa dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Begitu juga pada siswa berkebutuhan khusus yang berbeda tingkat dan tipe kecacatannya.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil tes kematangan sekolah, siswa berkebutuhan khusus di Al Irsyad dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: reguler, reguler modifikasi dan individual. Siswa berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kelompok reguler adalah siswa yang tidak mempunyai hambatan secara akademik 0-50% mata pelajaran. Siswa kelompok reguler ini dapat mengikuti semua kurikulum reguler kelas tanpa modifikasi tapi diperkenankan untuk diterjemahkan. Mereka mampu menerima pelajaran secara klasikal. Tingkat kebutuhan pelayanan kelompok ini termasuk ringan. Akan tetapi apabila pihak Al Irsyad dan atau orang tua melihat adanya kebutuhan pendampingan, maka siswa dapat didampingi oleh guru pendamping (*aide teacher*) pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas.¹⁰⁸

Ketentuan belajar untuk kelompok ini adalah siswa belajar 90-100% di kelas dan belajar individual 0-10% dengan guru SEN Unit. Siswa berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kelompok reguler modifikasi

¹⁰⁷ Berdasarkan wawancara dengan Zaki Ahmad Basyrahil, Lc, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

adalah siswa yang mempunyai hambatan secara akademik 50-70% mata pelajaran. Siswa kelompok reguler modifikasi ini dapat mengikuti semua kurikulum reguler kelas dan modifikasi kurikulum. Dengan demikian, ada mata pelajaran tertentu yang dapat diikuti dengan penuh tanpa modifikasi, dan ada pula mata pelajaran yang dimodifikasi. Mereka mampu menerima 50-70% pelajaran secara klasikal. Tingkat kebutuhan pelayanan kelompok ini termasuk sedang. Akan tetapi apabila pihak Al Irsyad dan atau orang tua melihat adanya kebutuhan pendampingan, maka siswa dapat didampingi oleh guru pendamping (*aide teacher*) pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Ketentuan belajar untuk kelompok ini adalah siswa belajar 80-90% di kelas dan belajar individual 10-20% dengan guru pendamping.

Siswa berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kelompok individual adalah siswa yang mempunyai hambatan secara akademik 70-90% mata pelajaran. Siswa kelompok individual ini tidak menggunakan kurikulum reguler maupun reguler modifikasi, tetapi menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, mereka mengikuti pelajaran dengan program individual. Tingkat kebutuhan pelayanan kelompok ini termasuk berat, oleh karenanya mereka memerlukan pendampingan dari guru pendamping (*aide teacher*) pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Ketentuan belajar untuk kelompok

ini adalah siswa belajar 70-80% di kelas dan belajar individual 20-30% dengan guru pendamping khusus.¹⁰⁹

Kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam untuk siswa berkebutuhan khusus di Al Irsyad dilakukan dengan beberapa cara yaitu: *integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group*, program khusus, dan *therapy*. Kegiatan belajar mengajar yang *integrated in the regular classroom* adalah kegiatan belajar mengajar dimana siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa-siswa lainnya yang normal dalam satu kelas. Pada saat belajar, siswa berkebutuhan khusus bisa melakukannya dengan mandiri ataupun dengan pendampingan (didampingi *aide teacher*) tergantung tingkat keparahannya.¹¹⁰

Metode pembelajaran yang dipakai oleh guru di kelas inklusi sangat bervariasi supaya materi pelajaran lebih mudah diterima oleh siswa yang heterogen. Misalnya untuk materi sejarah, guru memberikan tugas kelompok untuk mencari materi sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah melalui internet, maka siswa berkebutuhan khusus dilibatkan secara aktif untuk ikut mencari materi tersebut dengan memanfaatkan media komputer. Sekalipun mereka punya keterbatasan, ternyata di bawah bimbingan guru mereka mampu menemukan materi sejarah tersebut. Walaupun untuk menyusun materi tersebut dalam bentuk makalah mereka kurang mampu melakukannya, tapi ketika presentasi di depan kelas, siswa berkebutuhan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

¹¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Darsitun, M.Pd.I, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

khusus dilibatkan kembali untuk tampil walaupun hanya sekedar untuk membaca saja.¹¹¹

Kegiatan belajar mengajar yang *one to one teaching* adalah kegiatan belajar mengajar dimana siswa berkebutuhan khusus belajar secara individual di ruang lain. Materi yang diajarkan adalah materi akademik, materi non akademik ataupun pendalaman materi yang biasanya disampaikan oleh guru mata pelajaran, ataupun guru pendamping. Kegiatan belajar secara individual dilakukan sebanyak 10% dari keseluruhan jumlah pertemuan untuk kelompok reguler, 20% dari keseluruhan jumlah pertemuan untuk kelompok reguler modifikasi, dan 30% dari keseluruhan jumlah pertemuan untuk kelompok individual. Sebagaimana dicontohkan oleh Bapak Zaki bahwa apabila jumlah jam pelajaran dalam satu minggu ada 40 jam, maka siswa berkebutuhan khusus kelompok reguler akan belajar 4 jam dalam seminggu di ruang lain.¹¹²

Kegiatan *one to one teaching* pada materi akademik biasanya dilakukan dalam rangka menyederhanakan dan memperkuat pemahaman siswa berkebutuhan khusus terhadap materi pelajaran yang sudah didapat di dalam kelas. Misalnya untuk siswa kelas 8 yang masuk kelompok individual, mengingat kemampuannya yang terbatas maka materi tentang shalat disederhanakan dalam bentuk gambar. Siswa diberi tugas untuk menuliskan tentang gerakan apa yang ada di dalam gambar tanpa harus

¹¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Abdul Manan, Lc, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

¹¹² Berdasarkan wawancara dengan Zaki Ahmad Basyrhil, Lc, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

menuliskan bacaan yang dibaca ketika gerakan tersebut dilakukan. Kegiatan ini harus dilakukan secara berulang sampai siswa betul-betul menguasai materi tersebut.

Kegiatan belajar mengajar *small group* adalah kegiatan belajar mengajar dimana siswa berkebutuhan khusus belajar dalam kelompok kecil pada saat pendalaman materi oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Pendalaman materi dilakukan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang sudah diajarkan guru di kelas.

Adapun kegiatan belajar mengajar program khusus adalah kegiatan belajar mengajar dimana siswa berkebutuhan khusus belajar dalam kelompok kecil dengan satu guru pendamping yang bertanggungjawab. Sedangkan untuk kegiatan terapi, siswa diperbolehkan untuk melakukan terapi pada jam sekolah dengan ijin khusus. Pembagian waktu antara sekolah dengan waktu terapi disesuaikan dengan kebutuhan siswa.¹¹³

Penanganan perilaku siswa berkebutuhan khusus di Al Irsyad dibagi dua yaitu penanganan perilaku pada kondisi biasa dan penanganan perilaku pada kondisi khusus. Penanganan perilaku siswa berkebutuhan khusus pada kondisi biasa merupakan tindakan preventif yang harus dipersiapkan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, dan atau guru pendamping (*aide teacher*) guna mencegah terjadinya perilaku khusus. Sedangkan penanganan perilaku siswa berkebutuhan khusus pada kondisi

¹¹³ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

khusus, merupakan tindakan yang dapat dilakukan pada saat ada kejadian khusus yang tidak terduga.

Tindakan preventif yang harus dipersiapkan oleh guru adalah dengan memberikan informasi yang jelas kepada siswa berkebutuhan khusus tentang aturan belajar dan kegiatan belajar yang akan dilakukannya secara visual. Sebagai contoh adalah ketika akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa kelompok individual, guru memberikan catatan di kertas mengenai langkah-langkah belajar yang akan dilakukan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Urutan kegiatan belajar adalah pembukaan/do'a, belajar, break, belajar, dan do'a/penutup. Sekalipun mereka punya keterbatasan kemampuan, keterbatasan tingkat konsentrasi, sering minta istirahat keluar dari kelas ketika belajar, ternyata mereka mampu mengikuti pelajaran seperti siswasiswa normal lainnya di dalam kelas.

Tindakan preventif guru lainnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa berkebutuhan khusus merasa nyaman di dalam kelas. Motivasi untuk kemajuan belajar siswa juga penting diberikan oleh guru di setiap kesempatan mengajar, serta memberikan *reward* yang telah disepakati oleh tim IEP untuk setiap kemajuan belajar yang mereka capai.¹¹⁴

Kejadian khusus yang tidak terduga dapat terjadi sewaktu-waktu. Contoh kejadian khusus adalah perilaku tidak patuh, dimana siswa tidak

¹¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Darsitun, M.Pd.I, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

mau mengikuti pengarahan atau permintaan orang tua atau guru. Kejadian khusus lainnya adalah perilaku mengganggu atau menyerang yang biasanya dalam bentuk tantrum (mengamuk), berteriak, menendang, memukul, menggigit, dsb.

Cara menangani perilaku khusus yang dilakukan siswa adalah dengan mencari akar permasalahannya. Guru biasanya akan bertanya pada siswa lainnya tentang apa sebenarnya yang telah terjadi. Ketika akar permasalahannya sudah diketahui, selanjutnya guru menentukan tindakan yang disesuaikan dengan perilaku dan karakteristik siswa. Tindakan yang diambil dapat berupa: pemberian hukuman, pemberian konsekuensi negatif, pengabaian, *differential reinforcement*, *time out*, *response cost*, dan *environment modification*.

Selain strategi itu, terdapat strategi pengajaran lainnya untuk siswa berkebutuhan khusus yang dapat menentukan juga keberhasilan pendidikannya yaitu: strategi *modelling*. Dalam pendidikan agama Islam, strategi *modelling* yang dalam hal ini sama dengan pendidikan melalui keteladanan merupakan pendidikan yang paling efektif. Apabila para guru telah menjadi teladan yang baik bagi para siswanya dalam berpegang pada akidah yang benar, berakhlak Islam dan menghargai kewajiban menuntut ilmu, maka akan lahir generasi terpelajar yang mempelajari sekaligus mengamalkan, generasi berakhlak sekaligus berpengetahuan, serta

generasi yang akidahnya berakar, akhlakunya baik, dan perbuatannya berakhlak sempurna.¹¹⁵

Akhlak yang baik dan sempurna tidak akan tumbuh tanpa diajarkan dan dibiasakan. Oleh karena itu, ajaran agama, selain sebagai ilmu, secara bertahap juga harus diikuti secara terus menerus bentuk pengamalannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah dan di lingkungan rumah. Bahan ajar pendidikan agama yang berupa dasar-dasar agama Islam seperti: wudhu, shalat, puasa, zakat, dan haji, diberikan dengan cara mengajak siswa untuk mempraktikkan atau mengamalkan ajaran agama tersebut secara benar dan dibiasakan terus menerus, bukan sekedar untuk dihapal. Sebagai contoh, wudhu dan shalat dapat dilakukan secara *role playing* bukan diceramahkan, tetapi dipraktikkan secara langsung.¹¹⁶

Demikianlah yang terjadi di Al Irsyad. Guru pendidikan agama Islam lebih banyak menekankan pada aspek pembentukan sikap dan kebiasaan yang baik dalam pembelajarannya. Sikap dan pembiasaan yang baik akan dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, bekerjasama, dan empati satu sama lain.

Pendidikan agama di sekolah bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mustamim Luthfi, S.Pd.I, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, 7 Juni 2016.

¹¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Darsitun, M.Pd.I, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016.

membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama dalam keluarga.

Keberhasilan pendidikan agama Islam di sekolah tidak hanya menjadi tanggungjawab guru agama sebagai motor penggerak pendidikan agama, tetapi juga menjadi tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, menjadi tugas semua pihak untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, agar moral dan akhlak siswa dapat terbentuk dengan baik. Keberhasilan pendidikan agama di sekolah juga akan tercapai apabila ada dukungan dari orang tua di rumah. Orang tua diharapkan menjadi teladan dalam beribadah dan berakhlak, misalnya dengan mengajak anak shalat berjamaah di rumah.

Dari beberapa strategi yang telah dijelaskan, di dalam praktiknya dapat dipilih mana yang sekiranya cocok dengan situasi kelas, materi, tujuan dan guru yang akan menggunakan. Demikian juga dalam penentuan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Islam bebas menentukan strategi yang paling cocok disesuaikan dengan kondisi kelas inklusi yang heterogen.

5. Evaluasi dan Sistem Penilaian

Secara umum, evaluasi dan penilaian pendidikan agama Islam yang diikuti siswa berkebutuhan khusus di Al Irsyad adalah: tes formatif, UTS, EHB, UAN/UAS, dan tes praktik. Tes formatif dilakukan sebanyak dua kali dalam 1 semester. UTS atau ulangan tengah semester dilakukan satu kali dalam 1 semester dan dilaksanakan pada pertengahan semester. EHB atau

evaluasi hasil belajar dilakukan sebanyak satu kali dalam 1 semester pada setiap akhir semester. UAN/UAS atau ujian akhir nasional atau ujian akhir sekolah adalah ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Kementerian Pendidikan Provinsi Daerah. Tes ini merupakan tes kelulusan bagi siswa kelas 9 untuk meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan tes praktik adalah tes yang dilakukan untuk menilai suatu materi berdasarkan praktik yang dilakukan oleh siswa sebagai peserta tes.¹¹⁷

Tes tertulis pelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa berkebutuhan khusus kelompok reguler, disamakan dengan siswa lainnya di kelas, dengan penambahan waktu 20 menit dari batas waktu yang tertera dalam lembar tes. Dalam kondisi khusus, siswa diberi soal dengan *font* huruf soal tes diperbesar dan dilaksanakan di ruangan tersendiri atau meja tersendiri menghadap dinding di dalam kelas untuk mengurangi distraksi. Siswa diingatkan untuk tetap tenang, membaca soal secara berulang dan perlahan-lahan, dan tetap mengerjakan soal apabila terlihat melamun atau hilang konsentrasi. Untuk mempertahankan konsentrasi, siswa diperbolehkan untuk memakai alat bantu yang tidak mengganggu siswa lain dan yang telah direkomendasikan oleh tenaga ahli (contoh: *headphone*).¹⁰¹

Untuk siswa berkebutuhan khusus kelompok reguler modifikasi, soal tes tertulis yang sudah dibuat oleh guru pendidikan agama Islam

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mustamim Luthfi, S.Pd.I, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, 10 Desember 2016.

diserahkan kepada guru pendamping siswa yang bersangkutan untuk dimodifikasi. Setelah selesai dimodifikasi, kemudian diserahkan kepada koordinator mata pelajaran untuk *direview* dan disetujui. Modifikasi harus sudah selesai dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan tes. Modifikasi yang dilakukan terhadap soal tes tertulis adalah menebalkan dan atau menggarisbawahi kata kunci, menyederhanakan kalimat soal, mengurangi jumlah soal, mengurangi tingkat kesulitan soal, dan menerjemahkan tulisan menjadi soal gambar. Sedangkan untuk siswa berkebutuhan khusus kelompok individual, soal tes pendidikan agama Islam dimodifikasi secara fleksibel sesuai dengan materi yang dipelajarinya yang tercantum di IEP. Bentuk tes dapat lisan atau tertulis dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat, atau memasangkan.¹¹⁸

Seluruh tes pelajaran pendidikan agama Islam yang diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus tersebut dikerjakan secara mandiri dan diberikan oleh guru pendidikan agama Islam dan guru pendamping tanpa memberi tanda, atau penjelasan yang mengarah pada jawaban, berupa intonasi suara, peragaan, atau pun tanda yang lain.

Adapun untuk kelulusan siswa berkebutuhan khusus, dibagi juga menjadi tiga yaitu jalur reguler, jalur reguler modifikasi dan jalur individual. Jalur reguler adalah siswa yang mengikuti tes sama dengan siswa reguler lainnya. Soal yang dikerjakan oleh siswa adalah soal standar Diknas atau standar sekolah, melalui adaptasi cara tanpa adaptasi isi. Jalur

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Umami Palupi, S.TP, Wakil Kepala Kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 10 Desember 2016

reguler modifikasi adalah siswa yang mengikuti tes sama dengan siswa lainnya, dengan melakukan beberapa modifikasi terhadap soal yang diberikan. Sedangkan jalur individual adalah siswa yang mengikuti tes tersendiri dengan program dan materi yang telah ia pelajari.¹¹⁹

Laporan tertulis tentang hasil evaluasi dan penilaian pendidikan agama Islam dituangkan pada rapor yang bagi siswa berkebutuhan khusus dimungkinkan untuk mendapatkan 3 macam rapor yaitu: rapor angka diknas, rapor narasi, dan rapor IEP.

Rapor Angka Diknas merupakan rapor standar dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, namun dikeluarkan secara independen oleh pihak Al Irsyad karena sudah berstatus disamakan dengan sekolah pemerintah. Bagi siswa berkebutuhan khusus dengan program modifikasi dan individual disertakan keterangan yang dijabarkan pada rapor IEP dan rapor narasi. Rapor narasi merupakan rapor yang diadakan oleh Al Irsyad. Rapor ini berupa deskripsi untuk menjabarkan angka yang tertulis pada rapor angka diknas. Rapor narasi siswa berkebutuhan khusus dengan program modifikasi dan individual diisi oleh guru mata pelajaran dan guru khusus setelah mendapat masukan dari penanggung jawab pendidikan inklusi. Sedangkan narasi untuk program khusus dilakukan oleh penanggung jawab pendidikan inklusi. Rapor IEP merupakan hasil evaluasi dari IEP untuk satu semester. Rapor IEP diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus yang mempunyai program IEP. Guru yang

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Umami Palupi, S.TP, Wakil Kepala Kurikulum SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 10 Desember 2016

bertanggungjawab mengisi rapor IEP adalah guru pendamping yang bekerjasama dengan penanggung jawab pendidikan inklusi.¹²⁰

Pemantauan terhadap perkembangan belajar siswa berkebutuhan khusus juga dilakukan melalui pencatatan hasil kerja siswa yang disebut dengan *student's recording*. *Recording* merupakan format/bahan penilaian atas pelaksanaan KBM yang telah dilakukan guru dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi siswa, juga sebagai panduan dalam pembuatan IEP. Sistematika perumusan format penilaian dibuat sederhana dan semudah mungkin untuk dapat dimengerti oleh orang tua dan guru. Pencatatan hasil kerja siswa meliputi: *worksheet*, catatan aktivitas siswa, *daily log*, *visual recording*, dan *audio recording*.¹²¹

Worksheet adalah lembar kerja/tugas yang diberikan kepada siswa oleh pihak sekolah (guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping). *Worksheet* dapat berbentuk lembaran ataupun berbentuk buku. Tujuan diberikannya *worksheet* adalah sebagai alat pengajaran sekaligus alat ukur kemampuan siswa. Pemberian *worksheet* disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk siswa kelompok reguler, *worksheet* dibuat oleh guru mata pelajaran. Untuk kelompok reguler modifikasi, *worksheet* dibuat oleh guru kelas dan guru pendamping. Sedangkan untuk kelompok Individual, *worksheet* dibuat oleh guru penanggung jawab pendidikan

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016

¹²¹ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016

inklusi dan atau guru mata pelajaran yang mengajar secara *one on one teaching*.

Catatan aktivitas siswa adalah ceklis tertulis tentang aktivitas yang dilakukan siswa secara berkala sesuai IEP yang telah disusun di awal masa pembelajaran. Catatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi program tertentu yang membutuhkan pembiasaan/internalisasi pada siswa seperti program bertamu, berbelanja, kemandirian di sekolah, sosialisasi, dll. *Daily log* adalah catatan dinamika sesi belajar yang ditulis oleh guru pendamping maupun wali kelas. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peristiwa yang terjadi pada siswa selama di sekolah. *Daily log* juga berfungsi sebagai buku komunikasi guru dengan orang tua siswa. *Daily log* merupakan milik sekolah dan akan disimpan sekolah sebagai data. Isi dari *daily log* adalah: hari/tanggal; konsep yang diajarkan; *resources*; respon, perilaku, dan pemahaman siswa; target, metode, dan *resources* untuk sesi selanjutnya.¹²²

Visual recording adalah rekaman gambar/visual berupa foto atau video tentang dinamika sesi belajar siswa baik di kelas, ruang unit lain, acara tertentu, *field trip*, dan saat tes/ujian. Tujuannya adalah untuk melengkapi *record* tertulis dengan merekam secara visual perilaku siswa dalam situasi dan kondisi tersebut di atas. *Audio Recording* adalah rekaman suara dari siswa baik di kelas, ruang unit lain, acara tertentu, *field trip*. Dapat berupa kegiatan *story telling*, *conversation*, dll. Tujuannya

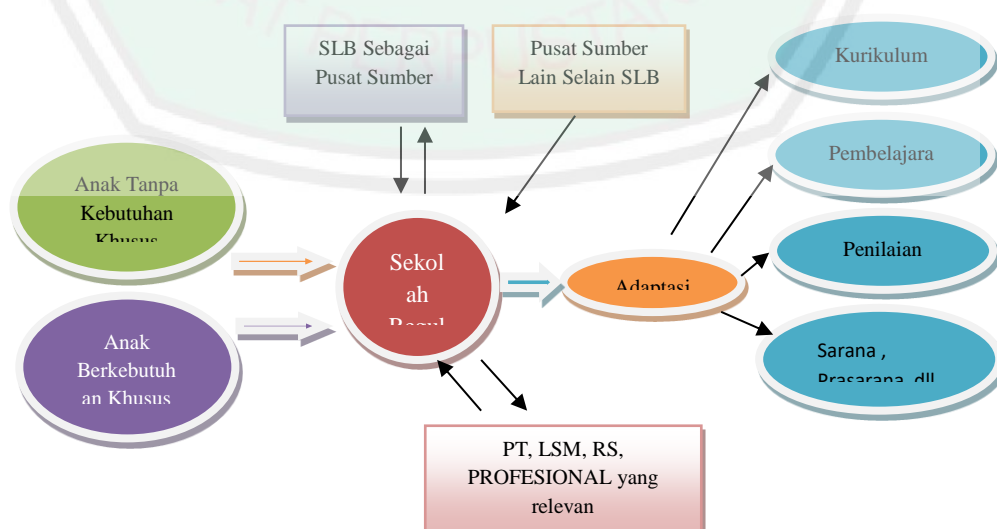
¹²² Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016

adalah melengkapi *record* tertulis, rekam gambar dengan rekaman suara perilaku siswa dalam situasi dan kondisi tersebut di atas.¹²³

Evaluasi di Al Irsyad, selain dilakukan terhadap siswa, juga dilakukan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Evaluasi biasanya dilakukan dalam sebuah pertemuan yang rutin dilaksanakan oleh seluruh guru Jum'at. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran pada setiap minggu.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi dan penilaian pendidikan agama dilakukan untuk mengetahui taraf kemajuan suatu aktifitas di dalam pendidikan Islam. Dan yang menjadi sasaran evaluasi tidak hanya siswa saja, tapi juga guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugasnya di sekolah.

Setelah memperhatikan penjelasan Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad di atas, implementasi pendidikan inklusi dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.



¹²³ Hasil wawancara dengan Nur Amalina, S.Psi, Penanggung Jawab Inklusi SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 9 Desember 2016

(Sekolah Reguler menerima ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak (ATBK dan ABK) melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian dan sarpras.)



BAB V

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah anak berkebutuhan khusus usia sekolah di Indonesia, namun yang pasti, masih banyak anak berkebutuhan yang belum memperoleh layanan pendidikan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan alternatif sistem pendidikan lain yang lebih memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi ABK. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, model pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis, sesuai dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan

memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Semangat pendidikan inklusi adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto adalah salah satu sekolah di Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan pendidikan dalam setting inklusi. Tidak ada siswa yang bodoh adalah prinsip yang diyakini oleh semua pendidik di sekolah ini, sehingga input peserta didik sangat beragam tidak ditentukan berdasarkan tes potensi akademik maupun tes IQ. Namun bagaimana nanti peserta didik dengan input yang beragam tersebut diolah melalui suatu proses pembelajaran agar menjadi output yang berkualitas.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di sekolah yang bersangkutan pada rentang waktu 2 bulan diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, kemudian dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam tesis ini.

Pembahasan hasil penelitian beserta kaitannya dengan teori yang ada dan telah dibahas adalah sebagai berikut:

A. Prosedur Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik,

berbeda dengan anak pada umumnya.¹²⁴ Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusakan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan dan lain sebagainya. Anak berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen.

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda.¹²⁵ Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) faktor lingkungan (2) faktor

¹²⁴ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), cet. 1, hlm. 1.

¹²⁵ Abdul Hadits, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.5

dalam diri anak sendiri, dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak.¹²⁶

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Diantaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah, maupun di masyarakat sekitar sekolah.

Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional). Disebut mengalami kelainan/penyimpangan tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: 1) Penjaringan (screening), 2) Pengalihan (referal), 3) Klasifikasi, 4) Perencanaan pembelajaran, dan 5) Pemantauan kemajuan belajar.¹²⁷

Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong Anak Berkebutuhan Khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh: Guru kelas, Guru

¹²⁶ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, hlm. 1

¹²⁷ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, hlm. 24.

Mata pelajaran/Guru BK, Guru Pendidikan Khusus, Orang tua anak; dan atau Tenaga profesional terkait.¹²⁸

Seperti yang diterapkan di Al Irsyad, Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Pelayanan tersebut dapat berupa penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi mereka.

Dalam rangka mengidentifikasi (menemukan) anak berkebutuhan khusus, diperlukan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosi. Selain jenis kelainan tersebut terdapat anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau sering disebut sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Masing- masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Secara umum, Al Irsyad sudah menerapkan proses identifikasi ABK dengan sangat baik. Al Irsyad meyakini bahwa dengan mengamati anak yang mengalami gejala tersebut, guru dapat menentukan anak yang membutuhkan layanan khusus. Sedangkan untuk mendiagnosis yang secara menyeluruh dan mendalam, Al Irsyad bekerjasama dengan tenaga profesional yang berwenang, seperti dokter anak, psikolog, orthopedagog, psikiater, dan sebagainya.

¹²⁸ Depdiknas, Direktorat Jenderal Mandikdasmen & Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, hlm. 23.

B. Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad

Keberhasilan pendidikan inklusi tidak dominan dipengaruhi oleh faktor strategi pembelajaran yang diterapkan di lembaga-lembaga sekolah, tetapi juga ditentukan oleh faktor yang saling terkait satu sama lain. Komponen-komponen yang terkait dengan keberhasilan pendidikan inklusi, setidaknya menjadi gambaran untuk mengenal lebih jauh tentang faktor-faktor penting yang menentukan setiap sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pertama, Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar). Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan.¹²⁹

Kurikulum meniscayakan adanya keselarasan tujuan dan program yang dijalankan berjalan simultan. Tujuan yang hendak dicapai setidaknya telah tergambar dalam program yang tertuang di setiap kurikulum sehingga mencerminkan harmonisasi target pencapaian yang saling melengkapi satu sama lain. Target pencapaian dalam kurikulum merupakan tujuan ideal yang tertuang dalam proses pendidikan, karena ia menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Intinya, segala sesuatu yang hendak diajarkan kepada anak didik harus berdasarkan kurikulum yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga mencerminkan proses kependidikan yang mengandung aspek penting dalam lembaga pendidikan.

¹²⁹ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi aksara), hlm. 183.

Kurikulum pendidikan inklusi di Al Irsyad menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Dalam hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga kurikulum akademik dapat dipilah menjadi. Pertama, anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi. Kedua, anak dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional. Ketiga, anak dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisasi *barier* pada setiap ABK sebelum belajar akademik.

Kedua, Tenaga Pendidik (Guru). Faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya tenaga pendidik atau guru profesional dalam bidangnya masing-masing untuk membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik atau guru yang mengajar hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, dan memahami karakteristik siswa.

Guru memiliki peran vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahap evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap materi pelajaran.

Ketiga, Input Peserta Didik. Di Al Irsyad, Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar-mengajar di sekolah. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler bercampur anak lainnya (anak normal)? Bagaimana identifikasinya? Apa alat identifikasi yang digunakan? Siapa yang terlibat dalam identifikasi?

Dalam setiap jenjang pendidikan, peserta didik mengalami masa perkembangan yang terus-menerus berproses dari waktu ke waktu. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan. Dalam setiap tahap perkembangannya, manusia mempunyai karakteristik yang khas dan bermanfaat sebagai petunjuk arah perkembangan yang normal.

Peserta didik menjadi komponen penting dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusi. Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, peserta didik diatur sedemikian rupa agar mereka dapat ikut serta merealisasikan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Di Al Irsyad, semua peserta didik tanpa terkecuali harus terlibat aktif dalam mengelola kegiatan pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik.

Keempat, Lingkungan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Bila mencermati komponen-komponen keberhasilan pendidikan inklusi, akan ditemukan banyak faktor pendukung yang berkaitan dengan pengaruh

lingkungan. Dalam kaitan dengan sistem dukungan, terdapat peran orang tua, sekolah khusus (SLB), dan pemerintah yang perlu diperhatikan. Beberapa komponen terkait dengan lingkungan sekitar juga sangat menentukan bagi keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Peran orangtua sangat menentukan bagi peningkatan motivasi dan kepercayaan diri anak agar tetap tidak putus asa dalam menjalani kehidupan. Orangtua dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan rencana pembelajaran, pengadaan alat, media, dan sumber daya yang dibutuhkan sekolah. Aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah. SLB dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah, dalam memahami kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus dan layanan pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan.

Pemerintah juga berperan penting dalam menentukan pelaksanaan pendidikan inklusi. Pemerintah dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusi, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan

sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas.

Sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, Al Irsyad mencoba untuk bekerjasama dengan orangtua, Sekolah Luar Biasa, Instansi Terkait dan juga pemerintah dalam rangka berupaya memberikan layanan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Kelima, Sarana-Prasarana. Sarana-prasarana adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Sebagai salah satu komponen keberhasilan, tersedianya sarana-prasarana tidak mudah diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras dari pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang mendorong peningkatan kualitas anak berkebutuhan khusus, sarana-prasarana hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan.

Sarana-prasarana adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu bagaimana bila dikaitkan dengan konsep pendidikan inklusi? Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan, sarana-prasarana berkaitan langsung dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling (BK), dan ruang multimedia.

Keenam, Evaluasi Pembelajaran. Menurut Gronlund dalam bukunya Rusman (2009 :93), evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.¹³⁰ Evaluasi pembelajaran bagi peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar, baik yang berupa kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Proses evaluasi digunakan untuk memberikan suatu nilai kepada objek yang dievaluasi sehingga manfaat atau nilai instrinsiknya dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam pendidikan inklusi, evaluasi pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, seperti dikutip dalam pasal 7 sampai 9 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 bahwa, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya. Begitu juga pembelajaran yang digunakan untuk individu berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi (2009) bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik dengan cara melakukan evaluasi secara simultan dan berkelanjutan.¹³¹

¹³⁰ Rusman, *Manajemen Kurikulum. Edisi 2*, (Jakarta: Rajawali Press 2009), hlm. 93.

¹³¹ Permendiknas nomor 70 tahun 2009

Begitu pula penilaian sebagaimana disebutkan dalam pasal permendiknas tersebut. Pertama, penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusi mengacu pada jenis yang bersangkutan. Kedua, peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti Ujian Nasional. Ketiga, peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Keempat, peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah. Kelima, peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Keenam, peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau satuan pendidikan khusus.

Jika memerhatikan penjelasan di atas, kemudian dikaitkan dengan bagaimana implementasi pendidikan inklusi di Al Irsyad, maka bisa diambil kesimpulan bahwa implementasi pendidikan inklusi di Al Irsyad telah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan beberapa faktor; kurikulum

yang fleksibel, input peserta didik yang heterogen, terpenuhinya tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, dan evaluasi program yang berjalan dengan baik. Ini semua merupakan bagian dari upaya memberikan layanan pendidikan untuk semua tanpa memandang ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Setiap anak diberikan layanan terbaik sebagai wujud memberikan pendidikan untuk semua (*education for all*).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum semua Guru memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dengan baik. Al Irsyad memahami bahwa ketika suatu sekolah telah dan akan menyelenggarakan pendidikan inklusi, maka langkah pertama yang harus disiapkan dan diperhatikan adalah memberikan bekal kemampuan kepada guru-guru agar memiliki kemampuan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus di Al Irsyad dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: (1) penjarangan (screening), (2) pengalihanganan (referral), (3) klasifikasi, (4) perencanaan pembelajaran, dan (5) pemantauan kemajuan belajar.
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah reguler menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak (anak tanpa berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus). Layanan yang diberikan berupa: (1) Kurikulum yang fleksibel. Ada 3 model pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu: model kurikulum umum (reguler), model kurikulum umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang

diindividualisasikan. (2) Strategi Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: *integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group*, program khusus, dan *therapy*. (3) Tenaga Pendidik yang memiliki kompetensi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Di sekolah umum penyelenggaraan pendidikan inklusi terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK). (4) Sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi hendaknya selalu melakukan koordinasi internal dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten terutama dengan Bidang Tenaga Kependidikan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidik yang memahami dengan baik konsep dan

implementasi pendidikan inklusi sehingga semua kategori peserta didik berkebutuhan khusus dapat tertangani dengan baik

2. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi hendaknya memfasilitasi tenaga pendidik dengan mengikutkan pada seminar-seminar yang terkait dengan pendidikan inklusi, agar pendidikan inklusi tidak hanya dipahami oleh penanggung jawab inklusi, guru pendamping khusus, pihak BK, akan tetapi semua guru memahami dengan baik bagaimana pendidikan inklusi yang sesungguhnya.
3. Agar aspek pemerataan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak diabaikan, maka Dinas Pendidikan terkait perlu meninjau kondisi kecamatan-kecamatan yang memiliki sekolah inklusi dalam jumlah yang sedikit atau bahkan belum memiliki sekolah inklusi.
4. Agar pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah inklusi dapat berjalan dengan baik, maka guru-guru di sekolah reguler, terutama guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (yang ditunjuk Dinas Pendidikan) perlu terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi yang berkaitan dengan konsep pendidikan inklusi.
5. Agar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak melaksanakan pendidikan inklusi sendirian, maka orang tua peserta didik berkebutuhan khusus perlu terus aktif untuk berkordinasi dengan pihak sekolah dalam rangka mengetahui kondisi, perkembangan, dan kebutuhan anak-anak mereka di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Anderson, James E. *Public Policymaking: An Introduction, 5th ed.* Boston: Houghton Mifflin, 2003.
- Arifin, Muzayyin. *Ilmu Pendidikan Islam.* Bandung: Bumi Aksara, 2003.
- Bafadal, Ibrahim. *Managemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Bahri, Syaiful dan Azwan Zain. *Strategi Belajar Mengajar.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Barokah, Siti "Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusi : Studi Kasus pada Sekolah Inklusi SD Hj.Isriati Semarang," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Buseri, Kamrani. *Antologi Pendidikan Islam dan Dakwah; Pemikiran Teoretis Praktis Kontemporer.* Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition.* London: SAGE Publications, 1998.
- Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Delphie, Bandi Delphie. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi.* Klaten: PT Insan Sejati Klaten, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya.* Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif.* Jakarta: Diknas, 2007.
- Direktorat PLB. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Menenal Pendidikan Terpadu).* Jakarta: Depdiknas, 2004.
- Dunn, William N. *Publik Policy Analysis An Intraduction.* University of Pittsbuogh, Printice-Hal Inc Engleward Cliffs, t.th.

- Firdaus, Endis “Pendidikan Inklusi dan Implementasinya Di Indonesia,” Makalah: Disampaikan dalam *Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)* Purwokerto, 2010.
- Freud, Lunenburg. C. & Allan C. Ornstein. *Educational Administration; Concepts and Practices*. USA: Wadsworth, t.th.
- Friend, Marilyn & William D. Bursuck. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan Praktis untuk Mengajar*, terj. Annisa Nuriowandari. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gamida, Dadang. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Geniofam. *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*. Cet. 1. Jogjakarta: Garailmu, 2010.
- Hadits, Abdul. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Hakim, M. Lukman. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Ilahi, Mohammad Takdir. *Pendidikan Inklusif, Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Iswari, Mega. *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas, 2007.
- James, Amy, *School Succes for Children With Special Needs*. San Francisco: Josey-Bass A Wiley Imprint, 2007.
- Johnsen, Berit H. & Miriam D Skjorten. *Education-Special Needs Education*. Oslo University: Unifub Forlag, 2001.
- Kauffman, J.M. & D.P. Hallahan. *Exceptional Children: Introduction to Special Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Clippis: 2005.
- Kemp dan Dayton. *Instructional Media and Technologies for Learning*. New Jersey: Prentice Hall & Englewood Cliffs, 1996.
- Mangunsong, Frieda. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: LPSP3 UI, 2009.

- Martin Omagor, Loican, *Towards Inclusive Education*. www.eenet.org.uk/.../docs/Towards_Inclusive_Education_Uganda.doc
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mile, M.B. & Huberman A.M. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mitchell, David. *Contextualizing Inclusive Education*. New York: Routledge, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Al-Nahwali, Abd al-Rahman. *Usul al Tarbiyah al-Islamiyah wa-Asalibiha fi al-Bayti wa-al- Madrasati wa-al-Mujtama'*. Bairut Libanon: Daru al- Fikri al-Ma'asir, 1999.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Purwanto, Ngalm. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- PUSLITJAKNOV BALITBANG DEPDIKNAS, Pengkajian Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Diknas, 2008.
- Rieser, Richard. *Implementing Inclusive Education: A Commonwealth Guide to Implementing*. London: Commonwealth Secretariat, 2008.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Rusman. *Manajemen Kurikulum. Edisi 2*. Jakarta: Rajawali Press 2009.
- Semiawan, Conny R. *Belajar dan Pembelajaran dalam Taraf Usia Dini*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung : Mizan, 1997.
- Smith, J. David, ed. Mohammad Sugiarnin, Mif Baihaqi. *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Stubbs, Sue. *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. Oslo: The Atlas Alliance, 2002.

- Sudjana, Nana Sudjana & Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Sulistiyadi, Hery Kurnia “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Sidoarjo” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.
- Supriadi, Dedi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Suran, B.G. dan J.V. Rizzo, “Special Children: an Integrative Approach”, *Journal of Education* 161-162. Boston: Boston University, 1979.
- Suwito dan Fauzan. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syaodih, Nana. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Tarmansyah. *Inklusi (Pendidikan Untuk Semua)*. Jakarta : Depdiknas, 2007.
- Terry, G. R. *Principles of Management* (6th ed). (London Richard D. Irwin Inc, t.th.
- Tilaar, H.A.R. & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Qutb, Muhammad Qutb. *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun. Bandung: Al-Ma’arif, 1984.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Terori dan Proses*. Yogyakarta: MedPres, 2002

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSI DI SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO**

No	Pertanyaan	Jawaban	
Kelembagaan	1	Apakah Penyelenggara sekolah inklusif telah memperoleh ijin/penunjukkan dari pemerintah?	Iya, penyelenggaraan sekolah inklusif telah memperoleh ijin/penunjukkan dari pemerintah.
	2	Apakah sekolah mempunyai pengelola khusus (koordinator) program inklusif?	Iya, sekolah mempunyai pengelola khusus. Di Al Irsyad, di setiap jenjang pendidikan ada pengelola khusus program inklusif. Di SMP, koordinator yang bertanggung jawab terhadap pendidikan inklusif adalah Ustadzah Nur Amalina.
	3	Bagaimana sekolah menyelenggarakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif?	Demi terselenggaranya pendidikan inklusif yang utuh, sekolah selalu menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, baik kepada tenaga pendidik dan kependidikan baru maupun kepada siswa. Biasanya, koordinator pendidikan inklusif diberi waktu khusus untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pendidikan inklusif.
	4	Bagaimana sekolah merencanakan program pendidikan inklusif di sekolah?	Dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah memiliki perencanaan secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, atau menengah, atau jangka pendek?
	5	Apakah sekolah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif?.	Tentu, sekolah selalu berusaha melakukan koordinasi dengan pihak terkait (seperti Guru, karyawan, komite sekolah, orang tua siswa, tenaga ahli) dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif.

	6	Apakah sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif?	Selalu, karena dengan monitoring dan evaluasi, sekolah bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi peserta didik.
	7	Apakah sekolah melibatkan SLB dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif?	Sejauh ini belum, paling hanya mendatangkan anak-anak dari SLB ke sekolah, memberi kesempatan kepada anak-anak SLB untuk tampil di hadapan anak-anak.
	8	Apakah sekolah melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif?	Sekolah selalu berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, misalnya Perguruan Tinggi, Puskesmas/Dokter, Psikolog, Organisasi, Kecacatan, dll.
	9	Bagaimana sekolah melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusufi di sekolah?	Penyelenggaraan pendidikan inklusif tentu selalu dalam pengawasan pihak terkait, seperti dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi. Oleh karena itu, sekolah selalu membuat laporan tertulis (tahunan) mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan
	Kurikulum	10	Apakah kurikulum yang digunakan dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan ABK dalam setting pendidikan inklusif?
11		Bagaimana kurikulum yang digunakan di sekolah?	Pada umumnya, Al Irsyad menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah reguler. Yang dimaksud dengan

		<p>penggunaan kurikulum disini adalah penggunaan standar isi (si) dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang sama dengan sekolah umum yang diterbitkan oleh BNSP. Silabus dan rancangan program pembelajaran (RPP) yang digunakan di sekolah inklusi juga pada umumnya sama. Artinya sebagian besar guru-guru di Al Irsyad hampir tidak membedakan RPP bagi siswa umum dan bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Meskipun RPP-nya sama namun dalam pelaksanaannya, bagi anak berkebutuhan khusus menerapkan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan kepada peserta didik lainnya</p>
12	<p>Apakah setiap ABK di sekolah tersebut telah dibuatkan program pendidikan individual?</p>	<p>Tidak semua ABK dibuatkan program pendidikan individual, hanya anak-anak yang memang dirasa perlu untuk dibuatkan program pendidikan individual. Program pembelajaran individual merupakan rencana pengajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh tim terdiri dari orangtua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama.</p>
13	<p>Apakah sekolah memiliki administrasi pendidikan secara memedai khusus untuk ABK</p>	<p>Administrasi merupakan bagian penting dalam pendidikan, begitu juga dalam penanganan terhadap ABK, maka kami berusaha melengkapi adminstrasi bagi ABK di sekolah.</p>
14	<p>Apakah sekolah/guru mengatur tempat duduk siswa yang memungkinkan ABK</p>	<p>Apakah sekolah/guru mengatur tempat duduk siswa yang memungkinkan ABK memperoleh kemudahan dalam mengikuti</p>

	memperoleh kemudahan dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas?	proses pembelajaran di kelas?
15	Apakah sekolah/guru menetapkan standar ketuntasan minimal bagi ABK?	Standar ketuntasan minimal bagi ABK tergantung dengan kurikulum apa yang digunakan, jika mengikuti kurikulum reguler, maka Standar Ketuntasan Minimal disamakan dengan anak-anak reguler, jika menggunakan program pembelajaran individual, maka standarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Intinya, standar yang digunakan sama, dilakukan berbeda hanya bagi ABK yang memang tidak bisa mengikuti kelas reguler.
16	Apakah guru melakukan modifikasi dalam pelaksanaan penelian hasil belajar ABK?	Penilaian dalam setting pendidikan inklusif di Al Irsyad mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu: Apabila anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum umum yang berlaku untuk peserta didik pada umumnya di sekolah, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku seperti anak-anak reguler lainnya. Apabila anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum modifikasi, maka menggunakan sistem penilaian yang dimodifikasi sesuai dengan kurikulum yang dipergunakan. Apabila anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum program pembelajaran individualisasi (PPI), maka penilaiannya bersifat individual dan didasarkan pada kemampuan dasar awal (<i>baseline</i>).
17	Bagaimana jika nilai ABK belum sesuai dengan standar ketuntasan minimal?	Jika memang diperlukan, guru akan menyediakan tambahan waktu khusus bagi ABK di luar jam pembelajaran yang terjadwal untuk memberikan remediasi.
18	Apakah sekolah menyediakan layanan kompensatoris (missal Orentasi Mobilitas dan	Untuk saat ini, ABK di Al Irsyad hanya ada slow learner, ADHD, Autism, dan Retardasi Mental Ringan, maka tentu saja sekolah

Ketenagaan		Tulisan Braille bagi Tunanetra, Bina Bahasa Isyarat Bagi Tunarungu, Bina diri bagi Tunagraita Bina gerak bagi Tunadaksa Modifikasi Perilaku bagi Tunalaras dan Autis, dll) bagi ABK sesuai dengan kebutuhannya?	berusaha menyediakan layanan kompensatoris bagi ABK, hanya saja belum bisa maksimal karena sekolah kesulitan untuk mencari guru pendamping khusus bagi ABK.
	19	Apakah sekolah menyediakan laporan hasil belajar khusus bagi siswa ABK di luar laporan hasil belajar yang sifatnya umum berlaku bagi semua siswa?	Laporan hasil belajar yang digunakan di Al Irsyad adalah: Peserta didik yang menggunakan kurikulum umum, maka model laporan hasil belajar (raport) menggunakan model raport umum yang berlaku. Peserta didik yang menggunakan kurikulum modifikasi, maka model raport yang dipergunakan adalah raport umum yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi) dan portofolio yang menggambarkan kualitas kemajuan belajar. Peserta didik yang menggunakan PPI, maka model raport yang digunakan adalah raport khusus yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi) dan portofolio. Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar awal (<i>baseline</i>).
	20	Apakah sekolah memiliki Guru bantu untuk mendampingi ABK dalam mengikuti pembelajaran (selain GPK dan Guru kunjung)?	Tidak semua anak memiliki guru bantu, hanya anak-anak yang memang perlu untuk didampingi dalam mengikuti pembelajaran. Ini merupakan salah satu hambatan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di Al Irsyad, sekolah merasa kesulitan untuk menyediakan pendamping bagi ABK.
	21	Jika ya, apakah sekolah menyediakan dukungan pembiayaan secara khusus atas keberadaan Guru Pembimbing Khusus atau Guru Kunjung atau Guru bantu?	Untuk biaya bagi guru, sekolah bekerjasama sama dengan wali murid dalam hal pembiayaan. Pembiayaan juga bisa diambil dari bantuan dari pemerintah. Intinya sekolah berusaha untuk menyediakan dukungan pembiayaan secara khusus meski tidak 100%.

22	Apakah Sekolah menyediakan tenaga profesional non guru untuk membantu ABK yang mengalami hambatan dalam belajar belajar (misalnya dokter, psikolog, therapist, pekerja social, pelatih, dll)?	Tenaga profesional terkait adalah bagian penting dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, meski tidak berada di sekolah, akan tetapi kerjasama dengan tenaga profesional selalu dilakukan secara berkala, baik dokter, psikolog, dll. Misal untuk asesmen, maka sekolah bekerjasama dengan psikolog.
23	Jika ya, apakah kehadiran mereka di sekolah terjadwal secara rutin	Kehadiran mereka hanya jika dirasa perlu.
24	Apakah pembekalan (sosialisasi, pelatihan) tentang inklusi diberikan oleh mereka yang berkompeten dan / atau professional?	Sekolah sering mengundang mereka yang berkompeten dan / atau professional dalam memberikan sosialisasi tentang inklusi.
25	Apakah semua guru di sekolah ini telah cukup faham dan terampil dalam mengelola program pendidikan inklusif?	Tidak semua guru paham dengan baik bagaimana mengelola program pendidikan inklusif, terutama tenaga pendidik baru, meski demikian, sekolah selalu berusaha memberikan bekal berupa penjelasan awal tentang sekolah inklusi.
26	Apakah guru-guru di sekolah ini merasa masih sangat membutuhkan tambahan pembekalan atau pelatihan pendidikan inklusif?	Sangat, guru-guru masih sangat memerlukan tambahan pembekalan atau pelatihan pendidikan inklusif.
27	Apakah di sekolah memiliki guru berlatar belakang pendidikan psikologi dan / atau pendidikan luar biasa?	Iya, penanggung jawab pendidikan inklusi adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan psikologi dan / atau pendidikan luar biasa.
28	Apakah dalam penerimaan siswa baru sekolah menyediakan kuota khusus (kursi khusus) bagi ABK	Tidak ada kuota khusus dalam penerimaan ABK, siapapun yang mendaftar dan sesuai dengan ketentuan sekolah maka akan diterima.
29	Apakah sekolah melakukan	Pada dasarnya setiap guru harus mengetahui

	<p>proses identifikasi dan asesmen untuk semua siswa yang diterima dalam setiap penerimaan peserta didik baru?</p>	<p>latar belakang dan kebutuhan masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda baik karena faktor yang bersifat permanen seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik, ataupun yang tidak permanen seperti, masalah sosial, bencana alam, dll.</p>
30	<p>Jika ya, dalam melakukan identifikasi dan asesmen ABK apakah pihak sekolah bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten</p>	<p>Ada dua jenis asesmen yang biasa dilakukan oleh Al Irsyad, sebagaimana dijelaskan oleh Mustamim Luthfi: Pertama, Asesmen Fungsional Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik dalam melakukan aktivitas tertentu. Asesmen ini dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Kedua, Asesmen Klinis. Asesmen klinis dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, asesmen untuk mengetahui seberapa besar kemampuan melihat seorang anak yang memiliki hambatan visual, sehingga dapat menentukan alat bantu visual apa yang sesuai dengan anak tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam melakukan tugas sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.</p>
31	<p>Apakah sekolah memiliki alat/instrument khusus yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan asesmen?</p>	<p>Iya, sekolah memiliki alat/instrument khusus yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan asesmen.</p>

Peserta Didik	32	Apakah sekolah meminta informasi dan/atau pengisian data mengenai keadaan ABK kepada orangtua ABK yang bersangkutan?	Pada saat interview calon wali murid, pihak sekolah selalu meminta informasi mengenai calon siswa, salah satunya adalah tentang apakah calon siswa termasuk ABK atau bukan dan bagaimana kondisi anak di sekolah sebelumnya.
	33	Apakah sekolah melakukan pencatatan / pengadministrasian secara tertib atas hasil dari identifikasi dan asesmen?	Hasil identifikasi dan asesmen merupakan dokumen penting bagi sekolah dan menjadi salah satu panduan yang digunakan dalam memberikan layanan bagi siswa, maka hasil tersebut dicatat secara tertib oleh sekolah.
	34	Apakah sekolah menyediakan program pembinaan bakat khusus bagi ABK?	Salah satu program layanan pendidikan bagi ABK, sekolah menyediakan program pembinaan bakat khusus bagi ABK, misalnya bagi anak yang tertarik dalam bidang komputer, maka diberikan program pengembangan dalam hal komputer, begitu juga dengan bakat lainnya.
	35	Jika ya, apakah sekolah menyediakan dukungan tenaga khusus dan / atau sarana khusus?	Iya, dana bantuan dari pemerintah bisa digunakan untuk menyediakan tenaga khusus dan / atau sarana khusus.
	36	Apakah Sekolah melakukan promosi prestasi dan karya-karya ABK dalam berbagai forum dan / atau kesempatan tertentu	Iya, biasanya dilakukan saat open house.
	37	Apakah sekolah mempunyai sarana/media pembelajaran khusus ABK sesuai dengan kebutuhan anak Tunagrahita?	Tidak
	38	Apakah sekolah mempunyai sarana/media pembelajaran khusus ABK sesuai dengan kebutuhan anak Tunadaksa	Tidak

Pembiayaan		(cacat fisik)?	
	39	Apakah sekolah memiliki jaringan internet yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk menunjang pembelajaran?	Tidak
	40	Apakah sekolah memiliki ruang multi media yang memungkinkan setiap peserta didik dapat belajar lebih optimal	Iya, sekolah memiliki ruang multi media di lantai dua .
	41	Apakah dalam RAPBS sekolah, telah memasukan komponen pembiayaan untuk implementasi program pendidikan inklusif?	Iya
	42	Jika ya, apakah termasuk komponen gaji dan / atau upah khusus (missal tunjangan guru GPK, honor khusus, transportasi, intensif dll)	Iya, tapi tidak 100% dari sekolah, melainkan kerjasama dengan orantua dan menggunakan dana bantuan dari pemerintah.
43	Apakah sekolah menerima subsidi khusus dari pihak Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kab / Kota) untuk pengembangan pendidikan inklusif?	Iya	

*) Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Penanggung Jawab Pendidikan Inklusi, Bagian Pendidikan Menengah LPP Al Irsyad Al Islamiyyah, Bagian Pendidikan Dasar LPP Al Irsyad Al Islamiyyah

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN INKLUSI

Model Kurikulum	Sasaran Kurikulum berdasar hasil asesmen	Strategi Pembelajaran yang dapat dipilih	Jenis Penilaian yang dapat digunakan	Program Tambahan yang diperlukan (sesuai kebutuhan)						
				Bimbingan Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh guru kelas	Bimbingan keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh GPK (di kelas / di luar kelas)	Bimbingan akademik di luar kelas (remedial teaching) oleh guru kelas/GPK/ lainnya	Program pengayaan horisontal oleh guru kelas/ GPK	Program percepatan belajar oleh guru kelas/Bd. Studi dengan SKS	Program pengembangan bakat istimewa/ keterampilan vokasional	Program intervensi dengan melibatkan profesi lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1) Model Kurikulum Umum	1. Potensi kecerdasan rata-rata 2. hambatan non akademik ringan	Klasikal Kelompok Individual	Reguler Individual Proses	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh guru kelas	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif

1. Potensi kecerdasan rata-rata 2. hambatan non akademik sedang-berat	Klasikal Kelompok Individual	Reguler Individual Proses	Tentatif	Bimbingan keterampilan khusus sesuai hambatan nya dilaksanakan oleh GPK (di kelas / di luar kelas)	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif
1. Potensi kecerdasan sedikit di bawah rata-rata 2. hambatan non akademik	Klasikal Kelompok Individual	Reguler Individual Proses	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh guru kelas	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh GPK (di kelas/luar kelas)	Bimbingan akademik di luar kelas (remedial teaching) oleh guru kelas/GPK/ lainnya	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Program intervensi dengan melibatkan profesi lain
1. Anak dengan bakat istimewa / 2. Anak dengan cerdas istimewa	Klasikal Kelompok Individual	Reguler Individual Proses	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Program percepatan belajar oleh guru kelas/Bd. Studi dengan SKS	Program pengembangan bakat istimewa/ keterampilan vokasional	Tentatif

(2) Model Kurikulum Reguler dengan Modifikasi	1. Potensi kecerdasan di bawah rata-rata kategori ringan 2. hambatan non akademik ringan	Klasikal Kelompok Individual	Reguler Individual Proses	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh guru kelas	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh GPK (di kelas/luar kelas)	Bimbingan akademik di luar kelas (remedial teaching) oleh guru kelas/GPK/ lainnya	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Program intervensi dengan melibatkan profesi lain
(3) Model Kurikulum yang di individualisasikan	1. Potensi kecerdasan di bawah rata-rata kategori sedang 2. hambatan non akademik ringan - sedang	Klasikal Kelompok Individual	Reguler Individual Proses	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh guru kelas	Bimb. Keterampilan khusus sesuai hambatannya dilaksanakan oleh GPK (di kelas/luar)	Bimbingan akademik di luar kelas (remedial teaching) oleh guru kelas/GPK/ lainnya	Program pengayaan horisontal oleh guru kelas/ GPK	Tentatif	Program pengembangan bakat istimewa/ keterampilan vokasional	Program intervensi dengan melibatkan profesi lain



**LAPORAN EVALUASI PEBELAJARAN MURID
STUDENT DEVELOPMENT PROGRAM (SDP)**

**SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
PURWOKERTO**

No	Materi	Deskriptif
1.	Tarikh	Siswa kurang menguasai keseluruhan materi, seperti tentang Bani Umayyah, Bani Abasiyah, dan ilmuan-ilmuan islam yang berpengaruh di dunia. Dalam mengerjakan US siswa didampingi secara penuh.
2.	Fiqih	Dalam pemahaman terhadap materi zakat terutama tentang perhitungan zakan siswa masih belum dapat memahami, serta materi tentang puasa sunah dan keutamaannya juga kurang dikuasai oleh siswa. Dalam pelaksanaan ujian praktik ibadah, masih kurang baik karena siswa masih belum hafal do'a shalat jenazah.
3.	Aqidah islamiyah	Dalam penguasaan materi aqidah islamiyah, siswa sudah dapat menguasai dengan cukup baik. Dalam mengerjakan soal US yang berkaitan dengan aqidah islamiyah siswa dapat mengerjakan dengan cukup baik.
4.	Hadis	Siswa dalam penguasaan meteri cukup bagus sehingga dalam menyelesaikan US siswa mampu mengerjakan tanpa didampingi sepenuhnya namun siswa tetap dipantau agara tidak keliru dalam menjawab soal, dan untuk hadisnya & terjemahanya siswa masih perlu belajar lagi.
5.	B. Jawa	Siswa cukup baik dalam penguasaan materi tentang tembang, sesorah, dan parikan. Namun siswa masih kesulitan untuk menguasai materi tentang aksara jawa, siswa masih perlu untuk banyak belajar lagi.

6.	B. Arab	Fi'il Madhi, fi'il mudori, dan isim materi-materi tersebut belum dipahami oleh siswa sehingga masih perlu banyak belajar lagi dan dalam mengerjakan soal US perlu didampingi secara penuh, untuk memahami materi tentang sejarah "Umar bin Khatab" pemahaman & penguasaanya cukup baik itupun harus diterjemahkan terlebih dahulu secara penuh.
7.	Biologi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fermentasi/ jamur : misalnya pembuatan tape dengan ragi, pembuatan tempe/tahu dengan kedelai, pemahaman siswa terhadap materi tentang fermentasi cukup bagus ✓ Monohibrid (perhitungan & persilangan): siswa perlu mengulang dalam mempelajari materi tersebut karena siswa belum dapat menghitung & menyilangkan kaitanya monohibrid. ✓ Homozigot & heterozigot: untuk materi tersebut siswa dapat membedakan antara homozigot & heterozigot, sehingga siswa ketika ditugaskan untuk mengerjakan soal dapat mengerjakan dengan mandiri namun harus tetap diperhatikan untuk menghindari kekliruan. ✓ Organ-organ wanita: siswa masih keliru dalam memahami bagian-bagian dari organ-organ wanita. Siswa perlu belajar lagi untuk memahami semua materi-materi. Dalam mengerjakan soal US siswa mampu untuk mengerjakan soal sendiri namun masih perlu untuk diawasi agar tidak keliru.
10.	B. Indonesia	Siswa memahami sebagian besar materi bahasa Indonesia, hanya saja siswa masih kurang menguasai materi tentang drama, pantun, dan daftar pustaka. Siswa dapat mengerjakan sendiri soal US tidak perlu didampingi secara penuh hanya perlu diawasi dan sedikit di arahkan agar tidak keliru.
11.	Fisika	Siswa masih kurang dalam penguasaan materi fisika dan sangat perlu untuk banyak belajar lagi. Dalam mengerjakan soal US siswa masih perlu didampingi secara penuh.

12.	B. Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Recoun teks: siswa dalam materi tersebut perlu belajar kembali • Letter: pemahaman terhadap surat-menyurat pemahaman sisiwa cukup bagus namun ketika ditugaskan untuk membuat surat siswa enggan menyelesaikan. <p>Siswa cukup bagus untuk penguasaan kosakata sehingga tidak merasa sulit dalam menerjemahkan namun perlu diarahkan arti/maksud pertanyaan soal-soal US.</p>
13.	Matematika	Siswa masih kurang dalam penguasaan materi, hanya materi tentang kerangka bangun dan statistika yang sudah cukup dikuasau siswa sehingga siswa masih perlu banyak belajar lagi. Dalam mengerjakan soal US siswa masih didampingi secara penuh.
14.	PKN	Untuk keseluruhan materi PKN pemahaman & penguasaan siswa cukup baik sehingga dalam menyelesaikan soal US siswa mampu mengerjakan dengan cukup baik hanya perlu untuk diawasi.
15.	IPS	Materi tentang sejarah perang dunia II siswa masih keliru dalam memahami nama tokoh-tokoh yang terdapat disejarah, Namun untuk materi tentang globalisasi siswa dapat membedakan macam-macam globalisasi, seperti globalisasi ekonomi, globalisasi sosial & budaya, sedangkan mengenai materi tentang ASEAN siswa cukup bagus dalam penguasaan materi, siswa juga dapat mebedakan pengertian & contoh masing-masing organisasi “ILO, WHO, FAO dll”.

Catatan :

1. Siswa masih perlu banyak belajar terutama mapel Matematika & Fisika yaitu mengenai rumus-rumus.

Purwokerto, 04 Mei 2016

PJ Inklusi,

Nur Amalina, S.Psi



LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN MURID
STUDENT DEVELOPMENT PROGRAM (SDP)

SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
PURWOKERTO

NON AKADEMIK		
NO	ASPEK	EVALUASI
1	Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Ananda kurang memperhatikan perlatan sekolahnya sehingga menumpuk diatas meja, loker mejanya pun penuh dengan jajanan, Ananda juga sering tidak langsung membuang sisa jajannya.2. Ananda beberapa kali tidak membawa buku pelajaran untuk bimbel.3. Ananda dalam menggunakan penghapus bolpoint Ananda belum bisa memperkirakan kebutuhan. Ananda beberapa kali tidak melaksanakan piket kelas pre pos.
2	Emosi dan Perilaku	<ol style="list-style-type: none">1. Emosi dan mood Ananda masih labil. Terutama pada saat pelajaran pertama ananda masih malas-malasan untuk mengikuti pre test.2. Ananda lebih sering emosi saat ditegur untuk menyelesaikan/ melengkapi jawaban pre test ananda malah meminta aide teachersnya untuk menyelesaikannya. Hal ini sering kali terjadi pada saat mata pelajaran matematika dan fisika.
3	Motivasi	<ol style="list-style-type: none">1. Motivasi belajar Ananda lebih selektif untuk mengerjakan beberapa pelajaran tertentu. Motivasinya tinggi untuk mengerjakan pre test sesuai

		<p>pelajaran yang digemari dan rendah untuk pelajaran yang kurang digemari.</p> <p>2. Ananda lebih menyukai uraian teori dari pada pelajaran yang berhubungan dengan rumus dan berhitung.</p> <p>3. Pada waktu-waktu tertentu, ketika badmood, maka ananda hanya akan menyibukkan dirinya untuk menggambar bunga-bunga atau ngobrol dan menolak untuk melanjutkan menyelesaikan pre test.</p>
4	Konsentrasi	Konsentrasi ananda cukup serius dalam mengerjakan pre test ataupun US namun ketika ananda mulai lelah/malas menyelesaikan, ananda menjawab/mengerjakan dengan asal-asalan.
5	Kemandirian	Ananda masih harus melatih kemampuan motoriknya untuk lebih cekatan mengatur segala keperluan sekolahnya.

Treatment :

1. Bentuk sikap tegas dan melatih tanggung jawab pribadi sangat dibutuhkan saat ini, mengingat mood Ananda yang masih sering labil dan sulit untuk dikendalikan.

**INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAM
(IEP)
SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016**

AREA PEMBELAJARAN			
1. Matematika			
Performa Saat Ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Mengajaran	Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Ketertarikan dalam mengerjakan soal belum ada karena masih mudah pusing dan capek • Materi pembelajaran menggunakan materi SMP kelas 7 dan 8 • Kesadaran untuk menulis materi dipapan tulis sudah mulai nampak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memecahkan soal Kesebangunan dan kekongruenan • Mampu mengoperasikan suatu himpunan ke dalam bentuk diagram Ven • menggunakan sifat – sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan (Asosiatif, komutatif dan distributif) • Mampu memecahkan soal perbandingan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>One To One Teaching</i> pada saat pelajaran Matematika ✓ Dibuatkan lembar worksheet untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan dalam pengerjaan soal matematika. ✓ Penulusuran materi kelas 7 dan 8, dengan mengerjakan soal – soal prediksi UN ✓ Pemberian tugas berupa peloparan kembali materi yang dipelajari dengan berupa rangkuman tulisan dan lisan ✓ Penyederhanaan soal 	Aide Teacher
Evaluasi : Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah			
2. Bahasa Inggris			
Tujuan Jangka Panjang : Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar.			
Performa saat ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
Adinda sudah mau mengucapkan kalimat dalam bahasa inggris, dan mau mengikuti	Merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional (to get things done) dan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>One To One Teaching</i> pada saat pelajaran ✓ Dibuatkan lembar worksheet khusus untuk memudahkan pemahaman dan untuk memudahkan dalam 	Aide Teacher

tema yang dibahas di kelas. Kemampuan listening sudah cukup bagus dan cukup aktif.	interpersonal (bersosialisasi) pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang melibatkan tindak tutur : meminta, memberi kepastian, serta mengungkapkan dan menanggapi keraguan.	pengerjaan soal – soal yang diujikan. ✓ Penggunaan percakapan Bahasa Inggris secara aktif dalam kehidupan sehari - hari ✓ Penulusuran materi kelas 7 dan 8, dengan mengerjakan soal – soal prediksi UN ✓ Pemberian tugas berupa peloparan kembali materi yang dipelajari dengan berupa rangkuman tulisan dan lisan	
Evaluasi :			
✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah			
3. IPA			
Tujuan Jangka Panjang :			
- Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia - Memahami kejadian yang bersifat fisika di lingkungan sekitar			
Performa saat ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Ketertarikan adinda terhadap soal-soal biologi dan fisika belum ada karena banyak pelajaran yang lupa sehingga sulit mengerjakan soal-soal latihan ujian • Cenderung lupa dengan istilah – istilah biologi. • Masih sering menemui kesulitan ketika mengerjakan soal fisika 	<ul style="list-style-type: none"> - menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup - mengenal organ – organ pada manusia dan tumbuhan beserta fungsinya - memahami kejadian interaksi pada unsur abiotik dan biotic (ekosistem) dilingkungan sekitar rumah dan sekolah - memahami perubahan rumus 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>One To One Teaching</i> pada saat pelajaran baik di Outdoor maupun Indoor) ✓ Dibuatkan lembar worksheet khusus untuk memudahkan pemahaman dan untuk memudahkan dalam pengerjaan soal – soal yang diujikan. ✓ Penulusuran materi kelas 7 dan 8, dengan mengerjakan soal – soal prediksi UN ✓ Pemberian tugas berupa peloparan kembali materi yang dipelajari dengan berupa rangkuman tulisan dan lisan 	Aide Teacher

	<p>pokok menjadi rumus turunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi berbagai alat ukur - Mampu memahami perubahan zat dan wujudnya 		
<p>Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah 			
<p>4. Bahasa Indonesia</p>			
<p>Tujuan Jangka Panjang : Memahami wacana lisan berbentuk laporan.</p>			
Performa saat ini	Tujuan Jangka pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
<p>Dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan belum bisa fokus dan kurang teliti dalam mengerjakan soal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan isi dialog interaktif beberapa narasumber pada tayangan televisi maupun siaran radio 2. Mengomentari pendapat narasumber dalam dialog interaktif pada tayangan televisive maupun siaran radio 3. Mengkritik/memuji berbagai karya (seni atau produk) dengan bahasa yang lugas dan santun 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>One To One Teaching</i> pada saat pelajaran ✓ Dibuatkan lembar worksheet khusus untuk memudahkan pemahaman dan untuk memudahkan dalam pengerjaan soal – soal yang diujikan. ✓ Penelusuran materi kelas 7 dan 8, dengan mengerjakan soal – soal prediksi UN ✓ Pemberian tugas berupa peloparan kembali materi yang dipelajari dengan berupa rangkuman tulisan dan lisan 	<p>Aide Teacher</p>
<p>Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah 			
<p>Catatan tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila diperlukan, dengan melihat perkembangan siswa dapat dibuat program tambahan selain program diatas. 2. Untuk materi lainnya, standar kurikulum ikut dengan kelas, dan untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan dalam pengerjaan tugas Jihan di buatkan works-heet khusus. 			
<p>AREA PEMBELAJARAN : Non Akademik – Komunikasi (Bahasa Ekspresif & Tertulis)</p>			

Tujuan Jangka panjang : Ananda mampu mengungkapkan perasaan atau pendapatnya dengan cara yang benar dan mudah di pahami oleh orang lain			
Performa saat ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
Kemampuan bercerita yang dimilikinya sudah cukup baik, dan topic yang disukainya lebih beragam serta kecenderungan untuk menanggapi sudah mulai nampak.	Adinda mampu menceritakan perasaannya kepada orang lain tanpa dibantu oleh orang lain (aide Teacher).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Guru membimbing dengan cara mengarahkan topik pembicaraan jika menyimpang. ✓ Setelah selesai bercerita tentang perasaannya, guru berdiskusi dengannya tentang bentuk pengarahan yang positif untuk meredam atau menyalurkan perasaannya itu. ✓ Dari hasil diskusi, guru memintanya untuk menuliskan perasaannya itu beserta bentuk pengarahannya pada worksheet yang telah tersedia. Hasil dari tulisannya itu dikumpulkan dalam sebuah folder. ✓ Guru membuat jadwal topik perasaan dan satu hari dengan satu topik ✓ Kegiatan ini dilakukan setiap hari dalam durasi 15 menit. 	Aide Teacher
	Adinda dapat menceritakan pengalaman sehari-hari/ libur akhir pekannya baik lisan maupun tertulis dengan tata bahasa yang benar, berurutan sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orang Tua diminta untuk menuliskan secara garis besar dan berurutan terhadap aktifitas yang dilakukannya selama libur akhir pekan dibuka penghubung ✓ Ananda diminta 	<ul style="list-style-type: none"> - SDP Teaching Staff/ Aide Teacher - Orang Tua

	kenyataannya dan ejaan yang benar.	<p>untuk menceritakan aktifitas libur akhir pekannya kepada Ust. Akhmad setiap hari Senin pagi saat istirahat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ananda diminta untuk menyerahkan buku penghubung/ Diary kepada Ust. Akhmad agar dapat mengecek alur ceritanya. ✓ Guru mengarahkan kesesuaian alur cerita dan tata bahasanya jika menyimpang. 	
Kemampuan menyampaikan gagasan/ ide secara tertulis dalam bentuk cerita yang runtut masih perlu ditingkatkan dan Penguasaan tata bahasa masih perlu ditingkatkan	Adinda dapat membuat laporan tertulis tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dengan runtut dan benar. Sebagai media untuk mengasah kreativitasnya menulis serta mempublikasikannya melalui media (Mading, Surat Kabar, Power Point dll)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada waktu libur/ akhir pekan Ananda diajak study tour ke Sarana Umum/ Objek Wisata (Stasiun KA, Terminal, Pasar, dll) untuk mengamati hal yang menarik perhatiannya serta mendokumentasikan nya (dengan kamera digital, dll) untuk kemudian dibuat laporan tertulis dengan computer lengkap dengan dokumentasi yang diperolehnya. ✓ Pembuatan laporan dipantau oleh Aide Teacher untuk mengarahkan bagaimana cara membuat laporan yang baik. ✓ Minimal dapat tercapai pembuatan laporan tertulis 2 buah dalam 1 semester. 	<ul style="list-style-type: none"> - SDP Teaching Staff/Aide Teacher - Orang Tua
<p>Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah 			

AREA PEMBELAJARAN : non akademik – activity of daily living (adl)			
Tujuan jangka panjang : ananda mampu menata pola kebiasaan hidupnya dengan baik, tanggung jawab dan mandiri			
Performa saat ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
<p>1. Kemampuan beraktivitas yang dimilikinya masih harus diingatkan dan diarahkan.</p> <p>2. Kemandirian sudah mulai meningkat</p> <p>3. Kurang memperhatikan penampilan dan kebersihan diri dan lingkungan sekitar ananda</p>	<p>Adinda mampu melakukan kegiatan rutinitasnya selama disekolah tanpa dibantu oleh guru / Aide Teacher. Senantiasa menjaga meja tempat duduk bersih dari sampah dan sobekan kertas.</p> <p>Adinda mampu berangkat dan pulang sekolah tanpa didampingi oleh Aide Teacher</p>	<p>✓ Guru / Aide Teacher membuat form progress tracking</p> <p>✓ Guru / Aide Teacher berdiskusi dengan Ananda agar melakukan rutinitas selama disekolah dengan baik (tanpa dibantu oleh guru) dan memintanya untuk memberikan tanda cheklist pada form progrest tracking.</p> <p>✓ Setiap selesai pembelajaran dan ingin pulang, sebelumnya guru / Aide Teacher mengajak Ananda untuk mengisi form progrest tracking sambil diarahkan kenyataannya.</p> <p>✓ Aide Teacher dan orang tua murid menerapkan program, berupa proses keberangkatan dan kepulangan ananda dengan menggunakan angkutan dan sepeda tanpa didampingi aide teacher</p> <p>✓ Aide Teacher memberikan kode pada progrest tracking tersebut</p>	<p>- Guru Mapel SDP Teaching Staff/ Aide Teacher</p>

		<p>disamping tanda checklist yang dibuatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aide Teacher dan wali kelas memberikan tanda tangan setiap harinya pada form tersebut. ✓ Menerapkan program Home Stay pada liburan sekolah ✓ Evaluasi pengumpulan point dilakukan setiap minggunya oleh Orang Tua . Jika lebih banyak "mampu" maka setiap minggunya akan mendapatkan "reward"/ hadiah. ✓ Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari disekolah. 	
<p>Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah 			
<p>AREA PEMBELAJARAN : Non Akademik – Religion</p>			
<p>Tujuan Jangka Panjang : Ananda mampu beribadah dengan baik dan benar</p>			
Performa saat ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
<p>Adinda belum sepenuhnya mampu shalat dengan khusuk dan tenang. Sholat dengan buru-buru. Namun kesadaran adinda melakukan Dzikir dan Sholat Sunnah mulai kelihatan.</p>	<p>Adinda mampu shalat dengan khusuk dan benar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Di Sekolah: ✓ Membuat pantuan sikap dari tata cara Wudlu, sholat dan doa. ✓ Pantauan sikap belajar diisi oleh Aide teacher dan diketahui oleh Pj SDP ✓ Mereview pelaksanaan sholat dan doa antara Jihan dan Aide Teacher. ❖ Di Rumah: 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide Teacher - Keluarga

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Setelah sholat fardlu di rumah/ masjid, berdoa dan melaksanakan sholat sunnah. ✓ Melipat kembali sajadah & mukena dengan rapi, kemudian meletakkan di tempatnya semula. 	
<p>Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah 			
<p>AREA PEMBELAJARAN : Non Akademik – Sosialisasi dan Kepedulian Sosial</p>			
<p>Tujuan Jangka Panjang : Ananda mampu menjalin interaksi sosial dengan teman dan orang lain yang ada dilingkungan sekitarnya</p>			
Performa saat ini	Tujuan Jangka Pendek	Metode Pengajaran	Pelaksana
<p>1. Kemampuan berinteraksi yang dimilikinya sudah cukup baik, tetapi ikut melebur bermain dengan teman sebayanya masih perlu ditingkatkan,</p> <p>2. keaktifan interaksi dilingkungan masyarakat luas sudah mulai meningkat.</p> <p>3. Dalam memberikan kepedulian social pada lingkungan sudah mulai kelihatan ada peningkatan. Rasa egoisme ananda cukup fluktuatif,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adinda mau dan mampu bermain dengan teman sebayanya. - Adinda mau dan mampu menunjukan sikap dermawan dan bisa menolong orang lain yang membutuhkan. - Adinda mempunyai kepekaan social di tengah masyarakat luas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Di Sekolah: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Permainan bisa dilakukan didalam atau diluar kelas. ✓ Selama permainan berlangsung guru mengawasi dan membimbingnya. ✓ Guru membuat jadwal permainan setiap harinya dan teman bermainnya dapat berubah – ubah. ✓ Kegiatan ini dilakukan selama 10 menit (1 minggu 1 kali) saat istirahat berlangsung. ✓ Adinda, membagikan snack/ permen pada saya pada waktu istirahat setelah OR. ✓ Dilaksanakan 2 minggu sekali ✓ Snack/ permen dari Orang Tua/ tim SDP. 	<p>SDP Teaching Staff/ Aide teaher Keluarga</p>

<p>sehingga untuk berbagi dengan teman terkadang mudah berbagi dan terkadang merasa berat.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Di rumah: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada waktu liburan, Ananda diajak jalan-jalan/ bersepeda ke daerah-daerah yang baru. (Perpustakaan Umum, Masjid, Alun-alun, pasar tradisional, desa terpencil, dll) ✓ Sekali waktu, Ananda diajak jalan-jalan mengunjungi panti asuhan/ daerah terpencil ❖ Di tengah – tengah masyarakat luas : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekali waktu, Ananda diajak pergi ke suatu objek dengan menggunakan angkutan umum ataupun becak serta melatih berinteraksi orang di sekitar Ananda seperti dengan cara membayar ongkos tarip angkutan ataupun becak 	
<p>Evaluasi :</p> <p>Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah</p>			
<p>AREA PEMBELAJARAN : Non Akademik – Konsentrasi</p>			
<p>Tujuan Jangka panjang : Ananda mampu lebih banyak berkonsentrasi dalam aktivitasnya dan mampu melakukan aktivitas yang berkaitan dengan motorik halusnya</p>			
<p>Performa saat ini</p>	<p>Tujuan Jangka Pendek</p>	<p>Metode Pengajaran</p>	<p>Pelaksana</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi Adinda dalam mengerjakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adinda bisa focus dan berkonsentrasi serta melatih 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sering dilakukan memancing pertanyaan berbagai disiplin ilmu 	<p>Aide Teacher</p>

<p>soal-soal belum bisa fokus, karena masih suka bercerita, mudah cape, pusing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada tujuan yang diharapkan masih terbatas, dalam beraktifitas lebih bersifat rutinitas dan mood pribadi. • Tingkat kesabaran / ketekunan dalam berusaha untuk mencapai goals yang dicita-citakan masih rendah. 	<p>keuletan dalam berusaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adinda mampu melatih konsentrasi, pengendalian motorik halus tangan, kesabaran, dan keuletan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bermain puzzle ✓ Dilaksanakan seminggu sekali. 	
<p>Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah 			
<p style="text-align: center;">AREA PEMBELAJARAN : Non Akademik – Kerja sama</p>			
<p style="text-align: center;">Tujuan Jangka Panjang : Ananda mampu menjalin interaksi sosial dengan teman dan orang lain yang ada dilingkungan sekitarnya</p>			
<p>Performa saat ini</p>	<p>Tujuan Jangka pendek</p>	<p>Metode Pengajaran</p>	<p>Pelaksana</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan berinteraksi yang dimilikinya sudah cukup baik, tetapi kemampuan kerja sama dengan teman sebayanya masih perlu ditingkatkan. 	<p>Adinda mau dan mampu bekerja sama dalam game kerja sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Di Sekolah: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat <i>peer group</i> dalam game kerja sama satu kali dalam seminggu. ✓ Membuat prakarya / ketrampilan antara Aide Teacher dengan ananda 	<ul style="list-style-type: none"> - SDP Teaching Staff/ - Aide teaher

Evaluasi :

- ✓ Evaluasi bulanan dengan Aide Teacher , Orang Tua, Petugas SDP dan manajemen sekolah

Purwokerto, 3 Mei 2016

Penanggung Jawab

Aide Teacher

Nur Amalina, S.Psi

Khamdiyah

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Wali Kelas

Orang tua

Nandi Mulyadi, M.Pd.I

Tunjung Salastina, S.S



PERMENDIKNAS NO 70 TAHUN 2009 TENTANG INKLUSI

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG
MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI ECERDASAN DAN/ATAU BAKAT
ISTIMEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

1. Bahwa peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
2. Bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

Memutuskan:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI
KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan :

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau

bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

- 1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- 2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autism;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda

Pasal 4

- 1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- 2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- 1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- 2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- 3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6

- 1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- 3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.

Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 9

- 1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- 3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 10

- 1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- 2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- 4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- 6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
 - b. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
 - c. perguruan tinggi (PT)
 - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen agama;
 - e. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.

Pasal 11

- 1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

- 3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. Bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
 - c. Bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel.
- 5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggidan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO



مدرسة الإرشاد الإسلامية المتوسطة

**YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO**

Jalan Prof. Dr. Soeharso Purwokerto 53113 Telp. : (0281) 638185 Fax. : (0281) 643250
Website : www.alirsyadpwt.com ■ E-mail : smpalirsyadpwt@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN
No. 010/10307/L-E.4/VII-2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nandi Mulyadi, M.Pd.I**
NIA : **103.07.2802753**
Jabatan : Kepala SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Propinsi Jawa Tengah

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : **Arian Sahidi**
2. NIM : **14770040**
3. Program Studi : Program Magister Pendidikan Agama Islam
4. Instansi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Judul Penelitian : "Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)"

telah melakukan penelitian di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto mulai tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 27 Juli 2016

Kepala Sekolah



Nandi Mulyadi, M.Pd.I
NIA. 103.07.2802753

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

FOTO DOKUMENTASI



1. Gedung SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Tampak Depan



2. Gedung SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Tampak Samping



3. Kegiatan Tasmi' Al Qur'an Setiap Jum'at Pagi



4. Kegiatan Buka Bersama Puasa Ramadhan



5. Kegiatan Desain Kelas



6. Masa Orientasi Siswa Baru



7. Tahfidz Al Qur'an



8. Ekskur Pramuka



9. Kegiatan Belajar dan Mengajar



Biodata Penulis



Arian Sahidi, lahir pada tanggal 17 Agustus 1989 di Desa Padang Genteng, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Menghabiskan masa kanak-kanak di kampung halamannya. Pernah menjadi santri di Ponpes Roudlotul Ulum Bengkulu, menyelesaikan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta.

Anak kedua dari pasangan Z. Aripin dan Yusma Laila ini aktif menulis sejak tahun 2010. Pernah menelurkan beberapa karya tulis, baik berupa antologi maupun tunggal.

Penulis bisa dihubungi melalui:

Blog : ariansahidi.blogspot.com

E-mail : arian.sahidi@yahoo.com

Twitter : @ariansilencer

Facebook : www.facebook.com/arian.sahidi

